

**ANALISIS PENDAPATAN PETANI PENGARAP DALAM  
KERJASAMA MARO SAWAH  
(STUDI KASUS DI DESA KARANGSEMBUNG  
KECAMATAN SONGGOM KABUPATEN BREBES)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Ekonomi Islam**



**Oleh:**

**ALFINATIN RIZQI MUKAROMAH**

**NIM. 1505026087**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Alfinatin Rizqi Mukaromah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Alfinatin Rizqi Mukaromah

Nim : 1505026087

Judul : **Analisis Pendapatan Petani Penggarap dalam Kerjasama Maro Sawah (Studi Kasus di Desa Karangsembung Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. Siti Mujiyaton, M.Ag.**  
NIP. 19590413 198703 2 001

Pembimbing II



**Drs. Zaenuri, MH.**  
NIP. 19610315 199703 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7608454 Semarang 50185

### PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Alfinatin Rizqi Mukaromah  
NIM : 1505026087  
Judul Skripsi : Analisis Pendapatan Petani Penggarap dalam  
Kerjasama *Maro* Sawah (Studi Kasus di Desa  
Karangsembung Kecamatan Songgom Kabupaten  
Brebes)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal 19 Desember 2019 Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 19 Desember 2019

Ketua Sidang,

Dr. H. Imam Yahya, M. Ag.  
NIP. 19700410 199503 1 001

Penguji I,

Prof. Dr. H. Martono, M.A.  
NIP. 19590215 198503 1 005

Pembimbing I,

-Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatus, M. Ag  
NIP. 19590413 198703 2 001

Sekretaris Sidang,

Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatus, M. Ag.  
NIP. 19590413 198703 2 001

Penguji II,

Dra. Hj Nur, Huda, M.Ag.  
NIP. 19690830 199403 2 003

Pembimbing II,

Drs. Zaenuri, M.H.  
NIP. 19610315 199703 1 001

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

*“.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.*

QS Al-Maidah (2)

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT dan rasa syukur yang tak terkira dan sebagai ungkapan terimakasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Umi Maesaroh dan Abah Faizin (Alm), terimakasih atas segala do'a, bimbingan, dukungan, baik moral maupun material, yang telah mendidik dari lahir hingga saat ini dan juga kasih sayang yang tidak pernah berkurang sepanjang masa, tanpa umi dan abah tidak akan pernah sampai pada titik ini.
2. Untuk kakakku tersayang, mba Ovie Afifatuzzulfa, yang selalu memotivasi, mendorong, untuk menyelesaikan skripsi, terimakasih atas dukungan yang telah diberikan serta do'a yang selalu dipanjatkan.
3. Untuk Ibu Wartini dan keluarga selaku ibu kos selama 3 tahun terakhir, terimakasih sudah memberikan tempat tinggal disini yang nyaman serta memperlakukan penulis seperti keluarga sendiri.
4. Untuk sahabat Sayangnya IbuW, Titin Fatimah, Darul Imiati, Laili Fauziah, Rif'atul Ma'wa, yang selalu menyemangati, mendengarkan keluh kesah, meskipun akhirnya tidak bisa lulus bareng termakasih kalian.
5. Teman-teman EIC-2015, Keluarga Forshei khususnya angkatan 2015, Keluarga Imman Semarang, terimakasih sudah mewarnai hari-hari, membuat keceriaan, menambah pengalaman, wawasan, kalian luar biasa.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan oleh pihak manapun. Skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali pemikiran para ahli yang ada di dalam buku untuk dijadikan sebagai bahan referensi penulis.

Semarang, 13 Desember 2019

Deklarator



*Alfinatin Rizqi Mukaromah*

**Alfinatin Rizqi Mukaromah**

**NIM. 1505026087**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Cha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dh	De dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sh	Es dan ha
ص	Shad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dlat	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dha	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
  - a. Vokal rangkap (أَوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
  - b. Vokal rangkap (أَيُّ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fātihah*), (الْعُلُومُ = *al-'ulūm*) dan (قِيمَةٌ = *qīmah*).



4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya ( حَدَّ = *h?addun* ), ( سَدَّ = *saddun* ), ( طَيَّبَ = *t?ayyib* ).
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya ( الْبَيْتُ = *al-bayt* ), ( السَّمَاءُ = *al-samā'* ).
6. *Ṭa' marbūṭah* mati atau yang dibaca seperti ber-*h?arakat sukun*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *ṭa' marbūṭah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya ( رُؤْيَةُ الْهَيْلَالِ = *ru'yah al-hilāl* atau *ru'yatul hilāl* ).

Tanda apostrof (') sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya ( رُؤْيَةُ = *ru'yah* ), ( فُقُهَاءُ = *fuqahā'* ).

## ABSTRAK

Di pedesaan para petani ada yang mengelola sawahnya sendiri, ada yang dikelola (digarap) oleh orang lain, terkadang petani mengelola sebidang tanah yang bukan miliknya berdasarkan kesepakatan keduanya, istilah ini dikenal dengan sistem “*maro sawah*”. *Maro sawah* merupakan kerjasama dalam pertanian antara pemilik sawah dengan petani penggarap dimana semua biaya operasional ditanggung oleh penggarap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan praktik *maro sawah* di Desa Karangsembung Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, apakah kerjasama yang dilakukan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi bagi penggarap, serta mengapa petani penggarap mempertahankan kerjasama *maro sawah*.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan dokumentasi, sementara analisis data menggunakan deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kerjasama *maro sawah* di Desa Karangsembung menggunakan akad bagi hasil sesuai yang berlaku di sana, yakni 2:1 di mana 2 bagian untuk petani penggarap dan 1 bagian untuk pemilik sawah. Akad perjanjiannya hanya dilakukan secara lisan, hal tersebut dilakukan karena adanya rasa saling percaya. Bagi petani penggarap, hasil dari kerjasama *maro sawah* belum cukup untuk meningkatkan pendapatan ekonominya, karena dalam realitanya mereka masih bekerja di sektor lain untuk meningkatkan pendapatan mereka. Adapun alasan petani penggarap mempertahankan kerjasama *maro sawah* dengan pemilik sawah yakni karena faktor ekonomi, mereka mencoba usaha dengan menjadi petani penggarap dengan memanfaatkan keahlian yang mereka miliki.

*Kata kunci : Maro Sawah, Pendapatan, Petani Penggarap*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha pengasih dan penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, keluarga, dan para sahabat serta para pengikut beliau. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak. Aamiin.

Kepada semua pihak yang membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini, peneliti sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Wakil dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag, selaku kepala jurusan S1 Ekonomi Islam dan Bapak Nurudin, SE., MM, selaku Sekjur S1 Ekonomi Islam.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun M.Ag, selaku pembimbing I, dan Bapak Drs. Zaenuri, M.H selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk

memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, segenap civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
6. Keluarga besar Balai Desa Karangsembung, yang bersedia membantu, memberikan data dan informasi terkait penyusunan skripsi.
7. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendo'akan, mendukung, menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis ucapkan “*Jazakumullah khoiron katsiron* ”. Semoga Allah membalas segala amal baik dan jasanya dengan balasan yang sebaik-baiknya. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk semuanya. Aamiin.

Semarang, 13 Desember 2019

Penulis,

**Alfinatin Rizqi Mukaromah**

NIM. 1505026087

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>DEKLARASI</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
 <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Tinjauan Pustaka .....	13
E. Metode Penelitian .....	17
F. Analisis Data .....	20
G. Sistematika Penulisan.....	22
 <b>BAB II      LANDASAN TEORI</b>	
A. <i>Mukhabarah</i> .....	25
B. Petani Penggarap.....	42
C. Pendapatan .....	53
 <b>BAB III      GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Desa Karangsembung .....	59
B. Praktik Kerjasama <i>Maro</i> Sawah.....	65
C. Peningkatan Pendapatan Bagi Petani Penggarap .	70

#### **BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

A. Analisis Pendapatan Petani Penggarap Dalam Kerjasama <i>Maro</i> Sawah (Studi Kasus di Desa Karangsembung Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes) .....	77
B. Analisis Alasan Petani Penggarap Mempertahankan Kerjasama <i>Maro</i> Sawah.....	82
C. Analisis Peningkatan Pendapatan Kerjasama yang Dilakukan Pemilik Sawah dengan Petani Penggarap .....	85

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran-Saran .....	92
C. Penutup.....	93

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara agraris yang artinya bahwa pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk dan tenaga kerja yang hidup atau bekerja disektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari pertanian. Dengan ciri perekonomian agraris, maka lahan pertanian merupakan faktor produksi yang sangat besar artinya bagi petani. Perbedaan penguasaan terhadap jumlah dan mutu lahan mengakibatkan perbedaan produksi dan pendapatan dalam sektor pertanian. Pendapatan yang diterima oleh petani menentukan pola konsumsi dan tabungan petani.

Bagi bangsa Indonesia, tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan sekaligus merupakan kekayaan Nasional. Sebagian besar rakyatnya menggantungkan hidup dan kehidupannya pada tanah, terutama bidang pertanian. Tanah dalam masyarakat agraris mempunyai kedudukan yang sangat penting sehingga harus diperhatikan peruntukkan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, baik secara perorangan maupun gotong royong. Dinyatakan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa :  
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang banyak memberikan sumber kehidupan bagi rakyat Indonesia dan penting dalam pertumbuhan perekonomian. Hal tersebut diantaranya berkaitan dengan letak geografis dan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian, sehingga memungkinkan pengembangan sektor ini sebagai salah satu usaha dalam memacu pembangunan nasional.

Dalam perkembangannya ekonomi syari'ah terus tumbuh menyempurnakan diri di dalam beragamnya sistem sosial dan ekonomi konvensional yang berbasis sistem sekuler. Sebagai dari derivasi agama Islam, ekonomi syari'ah akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah aspek kehidupan, dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia termasuk dalam bidang ekonomi.

Menurut Iwan Nurdin, sebagian penduduk desa di pulau Jawa adalah petani dan buruh tani. Dari 28,3 juta Rumah Tangga Petani (RTP), sebanyak 6,1 juta RTP di Pulau Jawa adalah petani tak bertanah atau buruh tani. Apabila dihitung secara menyeluruh, saat ini terdapat sekitar 32 juta jiwa petani Indonesia adalah bagian dari keluarga buruh tani, dan 90 juta jiwa adalah bagian dari keluarga petani subsisten (Bonnie Setiawan: 2014).



Munculnya fenomena buruh tani dengan upah uang secara formal mulai dikenal sejak hadirnya perkebunan dan industri gula di Jawa, khususnya melalui kontrak gula (*suiker contract*). Hadirnya industrialisasi pertanian dan perkebunan pada masa itu telah menggenjot secara fantastis nilai dan jumlah ekspor komoditas pertanian dan perkebunan Hindia Belanda.

Namun, pertumbuhan tersebut tak berkorelasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan buruh. Bahkan, pertumbuhan petani gurem dan buruh tani terus meningkat dan menjamin ketersediaan buruh dalam sistem industri pertanian dan perkebunan milik penjajah (kolonial). Inilah yang menjadi salah satu dasar kesimpulan Gertz tentang gejala involusi pertanian dan sharing of poverty pada kehidupan petani Jawa.

Setelah kemerdekaan, dilahirkan pendekatan ekonomi politik untuk menyejahterakan petani gurem dan buruh tani melalui UU Pokok Agraria 1960, UU Pokok Bagi Hasil 1960, UU No 56/PRP Tahun 1960 yang mengatur tentang pembatasan kepemilikan lahan oleh perorangan, dan PP 224/1961 tentang *Land Reform*. Regulasi ini semangatnya menyediakan tanah bagi buruh tani, petani gurem, dan para penggarap. Sejak Orde Baru, pendekatan ini ditinggalkan karena dianggap memicu konflik politik, keresahan sosial, dan polarisasi di perdesaan. Orde Baru memilih investasi pertanian berbasis modal besar untuk pendukung revolusi hijau, minus pembaruan agraria.

Di era reformasi, investasi pemerintah di bidang sarana dan prasarana pertanian sangat sedikit dilakukan. Bahkan, hal ini diperburuk dengan pencabutan subsidi, pembukaan pasar bebas, dan liberalisasi sumber-sumber agraria seperti tanah, kebun, hutan, tambang, dan air kepada investor bermodal besar. Walhasil jebakan kemiskinan bagi penduduk perdesaan, khususnya buruh tani dan petani gurem, semakin dalam. Tidak ada proteksi dan subsidi bagi kaum buruh tani dan petani gurem, sehingga kehidupan mereka terus memburuk, hasil keringat dari bekerja di atas tanah pertanian tak lagi cukup untuk menghidupi diri dan keluarganya.<sup>1</sup>

Banyaknya jumlah petani yang menderita kekurangan tanah cukup besar, berakibat banyak sekali masyarakat di Pulau Jawa yang bekerja sebagai buruh tani karena tidak mempunyai lahan pertanian miliknya sendiri. Demikian halnya yang terjadi pada masyarakat di Desa Karangsembung, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, dimana sebagian masyarakatnya masih bekerja sebagai petani dan juga sebagai penggarap sawah milik orang lain.

Dalam pedesaan petani mengelola persawahan itu tidak sendiri, terkadang petani mengelola sebidang tanah yang bukan miliknya, berdasarkan perjanjian antara mereka. Istilah ini dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah “*maro sawah*”. Bagi

---

<sup>1</sup> <http://gagasanhukum.wordpress.com/2015/05/05/siapa-peduli-nasib-buruh-tani/>, diakses pada 19 Oktober 2019 pukul 22.14 WIB

hasil dalam pertanian merupakan suatu kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap lahan. Perjanjian ini muncul karena berbagai faktor, di antaranya : petani tidak memiliki lahan, jika saja memiliki lahan, tetapi tidak mencukupi kebutuhan, pemilik lahan tidak mempunyai kemampuan memproduktifitaskan sendiri, maupun pemilik lahan bertempat tinggal jauh dari lahannya.<sup>2</sup>

Dalam perspektif Islam, perjanjian kerja sama penggarapan sawah di kenal dengan istilah *mukhabarah* dan *muzara'ah*. Secara teori, *mukhabarah* sering dikaitkan dengan *muzara'ah*, karena keduanya sama-sama akad yang dilakukan dalam pengolahan lahan. Perbedaan dua akad tersebut hanya terletak dari pengadaan bibit, dimana *muzara'ah* bibitnya berasal dari si pemilik lahan, sedangkan *mukhabarah* merupakan aktivitas pengelolaan lahan (tanah) yang benihnya berasal dari si pengelola dan diharapkan dapat memberikan hasil dikemudian hari. Menurut ulama Syafi'iyah, *mukhabarah* adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya yang benihnya berasal dari pengelola. Adapun *muzara'ah* sama seperti *mukhabarah*, hanya saja benihnya berasal dari pemilik lahan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> M. Furqon, *Pengaruh Prinsip Al-Muzaraah dan Al-Mukhabarah Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Studi di Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara)*, 2015

<sup>3</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia 2001 h. 206

Menurut Sayyid Sabiq sewa menyewa tanah pertanian lebih bersifat untung-untungan karena hasil produksi tanah sewaan belum secara pasti kita ketahui kualitasnya, sementara pembayaran sewa dilunasi terlebih dahulu. Menyangkut pembagian kerja sama bagi hasil dalam pertanian dalam ketentuan hukum Islam tidak ditentukan secara jelas, maksudnya tidak ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa jumlah bagian masing-masing pihak, baik pemilik tanah maupun penggarapnya. Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga, atau lebih dari itu, atau lebih rendah, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>4</sup> Dengan demikian tidak ada ketentuan umum yang mengikat antara pemilik lahan dan penggarap lahan untuk selalu tetap berpegang pada ketentuan tersebut, karena pada prinsipnya bahwa kedua belah pihak tersebut saling membutuhkan. Pemilik lahan memiliki tanah tetapi tidak mampu mengolahnya, sebaliknya penggarap tidak memiliki lahan tetapi mempunyai kemampuan untuk mengolahnya.<sup>5</sup>

*Mukhabarah* memiliki syarat yang sama dengan *muzara'ah*, dimana keduanya merupakan akad pekerjaan yang

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Edisi Indonesia jilid IX Semarang : Toha Putra 1998 h. 36

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2002. h. 153

hanya boleh dilakukan setelah tercukupinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara', yaitu : (1) *mukhabarah* merupakan akad perjanjian, maka akad dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dibuatkan perjanjian kesepakatan ; (2) tanaman yang dipelihara hendaknya jelas dan dapat diketahui kedua belah pihak; (3) waktu penggarapan atau pemeliharaan harus jelas batasnya, apakah satu tahun, satu musim, satu kali panen, atau lainnya , hal ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan terhindar dari unsur penipuan oleh satu pihak; (4) presentase pembagian harus jelas dan pasti, baik bagi pengelola maupun pemilik lahan.<sup>6</sup>

Adapun dalil yang menjadi dasar hukum *mukhabarah* ialah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir bin Abdullah RA.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ (رواه  
البحاري)

Artinya : *Dari Jabir bin Abdullah RA, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa (diantara kalian orang yang ) memiliki tanah, maka hendaklah ia menanaminya atau menyuruh saudaranya untuk menanaminya dan janganlah menyewakannya" (HR. Bukhari)<sup>7</sup>*

---

<sup>6</sup> Syafei, *Fiqh*, h. 208-209

<sup>7</sup> Shoheh Bukhari, yang diambil dalam kutipan buku M. Nashiruddin Al-Bani, *Ringkasan Shoheh Bukhari*, Jakarta : Gema Insani Press 2007 cet. ke 1 jilid II h. 128-129

Adapun hikmah adanya kerja sama pertanian berharap saling bertukar manfaat di antara kedua belah pihak sehingga dapat melahirkan sebuah persaudaraan dan rasa saling menyayangi antar sesama. Dengan hak ini, seseorang juga dapat memiliki sifat amanah (dapat dipercaya). Semua itu adalah hikmah yang tinggi dan merupakan manfaat yang sangat besar. Amanah mempunyai makna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan, secara umum amanah dari Allah SWT kepada manusia ada dua yaitu ibadah dan khalifah. Dalam kehidupannya, seorang muslim harus melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-Nya, kepatuhan kepada Allah adalah kepatuhan yang bersifat mutlak, sebagai hamba.<sup>8</sup>

Praktik kerja sama antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap di Desa Karangsembung, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes sudah lama berlangsung, namun belum ada aturan yang secara rinci yang mengikat saat melakukan akad tersebut. Pelaksanaan perjanjian kerja sama dalam penggarapan sawah dapat dinarasikan sebagai berikut : Ibu Sutinah yakni salah satu petani penggarap di Desa Karangsembung, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, beliau menggarap sawah milik pak Shobirin yang luasnya  $\frac{1}{4}$  ha, dengan rinciannya sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Didin Hafidudin, *Manajemen Syari'ah dalam Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press, 2003, h. 102

## Pengeluaran

Benih 3 kantong	5 x 55.000	16 5.000
<i>Tandur</i>	10 x 30.000	300.000
<i>Njedil</i>		100.000
Pupuk (Termasuk Upah)		590.000
Matun (Membersihkan rumput)	10 x 40.000	400.000
Pengairan (Plus Sewa Desel)	5 x 200.000	1.000.000
<i>Blower</i> (Saat panen)		500.000
<b>Total</b>		<b>3.040.000</b>

## Pendapatan

<b>Hasil Bersih</b>	8 kw x 400.000	<b>3.200.000</b>
Petani Penggarap	2/3	2.130.000
Pemilik Sawah	1/3	1.070.000

Untuk sawah yang luasnya  $\frac{1}{4}$  ha, dibutuhkan 3 kantong benih padi, yang harganya Rp. 55.000,- tiap kgnya, kemudian dibutuhkan sekitar 2-3 orang untuk menanam benih tersebut setelah direndam selama 24 jam, masing-masing orang dibayar sejumlah Rp. 100.000,-

Setelah 7 hari, kemudian benih padi diberi pupuk yang jumlah totalnya Rp. 390.000,- untuk 2x memupuk yang upah untuk tenaganya Rp. 200.000,- pemberian pupuk tersebut dilakukan saat usia padi 7 hari dan 25 hari.

Setelah diberi pupuk 2x, kemudian dibersihkan tanaman padi tersebut dari rumput-rumput yang mengganggu, dalam bahasa daerah setempat disebut dengan istilah *matun*. Sama halnya dengan *tandur*, *matun* juga membutuhkan 10 tenaga yang masing-masing biayanya Rp. 40.000, untuk setiap orangnya.

Jika musim kemarau memanjang seperti sekarang ini, akan menambah beban bagi petani penggarap karena harus mengeluarkan biaya lebih untuk mengairi sawah yakni dengan cara mendesal, biasanya diperlukan 5-6 kali mendesal sampai panen yang masing-masing biayanya Rp. 200.000, untuk sekali desal. Saat sudah siap untuk dipanen, membutuhkan biaya untuk menyewa *blower* sebesar Rp. 500.000.

Jika ditotal seluruh biaya yang dikeluarkan Ibu Sutinah untuk menggarap sawah Bapak Shobirin seluas  $\frac{1}{4}$  ha adalah Rp. 3.040.000, sedangkan hasil bersih dari padi yang dihasilkan yaitu hanya 8 kw, masing-masing Rp. 400.000, untuk setiap kwnya, jadi total pendapatan yang dihasilkan hanya Rp. 3.200.000. Untuk pembagiannya pemilik sawah mendapatkan  $\frac{1}{3}$  yakni sebesar Rp. 1.070.000, dan untuk petani penggarap sebesar Rp. 2.130.000, Jika dihitung perharinya, petani penggarap hanya mendapatkan sekitar Rp. 23.600.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerja sama pertanian yang dilakukan di desa Karangsembung kecamatan Songgom kabupaten Brebes hanya akan merugikan petani penggarap, namun mengapa kerja sama tersebut masih



terus dilaksanakan ? Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang demikian dengan tema “Analisis Pendapatan Petani Penggarap dalam Kerjasama *Mukhabarah* (Studi Kasus di Desa Karangsembung Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes)”.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama *maro* sawah antara pemilik sawah dengan petani penggarap di Desa Karangsembung, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes?
2. Apakah pendapatan dari kerjasama *maro* sawah dapat meningkatkan pendapatan ekonomi bagi petani penggarap ?
3. Mengapa petani penggarap mempertahankan kerjasama *maro* sawah dengan pemilik lahan ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama *maro* sawah antara pemilik sawah dengan petani penggarap di Desa

Karangsembung Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

- b. Untuk mengetahui bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh pemilik sawah dengan petani penggarap dapat meningkatkan pendapatan ekonomi bagi petani penggarap.
- c. Untuk mengetahui alasan petani penggarap mempertahankan kerjasama *maro* sawah dengan pemilik lahan ?

## 2. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, diantaranya :

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sarana informasi dan wawasan keilmuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian sekaligus sebagai referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian.
- b. Penelitian ini sebagai wujud presentasi dari ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama proses belajar di perguruan tinggi serta sebagai sarana untuk berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
- c. Bagi petani, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat secara umum dan pada masyarakat di Desa Karangsembung, Kecamatan songgom, Kabupaten Brebes pada khususnya mengenai kerja sama pertanian sehingga dapat digunakan sebagai

masuk dalam pengambilan keputusan untuk melakukan aktifitas kerja sama pertanian.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Guna memudahkan dalam penelitian ini, maka diperoleh hasil penelusuran pustaka yang kaitannya dengan kemudahan dalam penelitian ini, ditemukan penelitian sebelumnya sebelumnya sebagai bahan perbandingan:

Penelitian yang *pertama* dilakukan oleh, Ahmad Nur Al Farizi jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia tahun 2018 dengan tema penelitian “Analisis Pendapatan Petani Padi di desa Kotasari kecamatan Pusakanegara kabupaten Subang”. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk menganalisis faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap pendapatan petani di desa Kotasari kecamatan Pusakanegara kabupaten Subang. Variable yang digunakan merupakan faktor-faktor yang diduga berpengaruh serta menentukan besar kecilnya pendapatan bersih yang akan diterima oleh petani yakni luas lahan sawah, jumlah penggunaan pupuk, pestisida cair, dan penggunaan tenaga kerja dalam satu musim tanam.

Adapun hasil penelitian ini menunjukan variabel jumlah penduduk, pestisida cair, lahan sawah, penggunaan tenaga kerja secara nyata bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan

petani padi di desa Kotasari kecamatan Pusakanegara kabupaten Subang.<sup>9</sup>

Penelitian yang *kedua* dilakukan oleh Erwin Syahwil Nasution, Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang tahun 2016 dengan tema penelitian “Analisis Pendapatan Petani Penggarap pada Usaha Tani Padi Sawah (*Oryza sativa*) di desa Muara Siambak kecamatan Kotanopan kabupaten Mandailing Natal ” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem kerja sama dan bagi hasil pada usaha tani padi serta menganalisis pendapatan petani penggarap di desa Muara Siambak kecamatan Katonopan kabupaten Mandailing Natal. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa terdapat tiga bentuk sistem kerjasama dan bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilik lahan, yaitu a) mardua (biaya ditanggung petani penggarap), b) mardua (biaya ditanggung bersama), dan marduaparlina (biaya ditanggung bersama). Hasil analisa pendapatan, rata-rata pendapatan petani penggarap sebesar Rp.5.752.079/Ha/MT dan rata-rata pendapatan petani penggarap perluas lahan sebesar Rp.1.720.637/Ha/MT. Pendapatan petani penggarap menurut sistem bagi hasil, yaitu sistem mardua (biaya ditanggung bersama) sebesar Rp.6.159.833/Ha/MT, sistem mardua (biaya ditanggung petani

---

<sup>9</sup> Ahmad Nur Al Farizi, Skripsi “Analisis Pendapatan Petani Padi di desa Kotasari kecamatan Pusakanegara kabupaten Subang”, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia , 2018, h.9

penggarap) sebesar Rp.5.898.302/Ha/MT dan sistem marduaparlima (biaya ditanggung bersama) sebesar Rp.3.611.235/Ha/MT.<sup>10</sup>

Penelitian *ketiga*, dilakukan oleh Ariansyah Jaya Saputra, jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2016 dengan judul “Kerja Sama Pengelolaan Lahan Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di desa Ngulak kecamatan Sangadesa kabupaten Musi Banyuasin”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui sistem kerjasama pengelolaan lahan pertanian di desa Ngulak kecamatan Sangadesa kabupaten Musi Banyuasin dan untuk mengetahui apakah kerja sama pengelolaan lahan sudah sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa kerjasama lahan pertanian di desa Ngulak kecamatan Sangadesa kabupaten Musi Banyuasin, yang dilihat rukun, syarat, berakhirnya akad dan tujuan dari ekonomi Islam sudah sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam. Tetapi, dilihat dari sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat desa Ngulak masih terdapat ketidak jelasan dari jumlah pasti dari hasil panen yang

---

<sup>10</sup> Erwin Syahwil Nasution, Skripsi, “*Analisis Pendapatan Petani Penggarap pada Usaha Tani Padi Sawah (Oryza sativa) di desa Muara Siambak kecamatan Kotanopan kabupaten Mandailing Natal*”, Padang : Universitas Andalas, 2016, h.7

dihasilkan oleh pihak petani penggarap, selain itu perolehan dari hasil panen, pemilik lahan tidak mendapatkan bagian, dari hasil panen yang ditanam selain dari tanaman padi.<sup>11</sup>

Penelitian yang *pertama*, yakni sama-sama membahas analisis pendapatan petani padi desa yang dalam hal ini bertujuan apakah meningkatkan pendapatan atau tidak, sedangkan perbedaannya fokus permasalahannya berbeda, jika yang telah dilakukan adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya lahan sawah, pestisida cair, dan juga jumlah tenaga kerja yang diperlukan, selain itu juga subjeknya lebih umum, yakni petani sedangkan penelitian yang akan saya lakukan yakni hanya fokus di petani penggarap.

Penelitian yang *kedua*, persamaanya yakni bertujuan untuk menganalisis pendapatan petani penggarap di desa, adapun perbedaannya dalam penelitian ini yakni akan membandingkan hasil pendapatan bersih petani penggarap rata-rata tiap harinya berapa, apakah sudah sesuai dengan UMR di kabupaten Brebes ataukah belum mencapai .

Penelitian yang *ketiga*, persamaanya yakni bertujuan untuk mengetahui serta menjelaskan bagaimana praktik kerja sama pertanian di desa tersebut, perbedaanya disini hanya fokus

---

<sup>11</sup> Ariansyah Jaya Saputra, Skripsi “*Kerja Sama Pengelolaan Lahan Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di desa Ngulak kecamatan Sangadesa kabupaten Musi Banyuasin*”, Palembang : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016, h.3

apakah sudah sesuai dengan ekonomi Islam atau belum, sedangkan yang akan saya lakukan fokusnya terhadap pendapatan petani penggarap dari kerja sama pertanian yang dilakukan.

Namun dalam penelitian yang akan saya lakukan akan berbeda dengan penelitian terdahulunya, saya akan menambahkan apakah dengan hanya mengandalkan kerja sama pertanian dengan sistem *mukhabarah* sudah bisa mencukupi kebutuhan hidup petani penggarap?. Mengingat panen membutuhkan waktu tertentu (musiman) sementara kita tetap harus mengeluarkan kebutuhan sehari-hari.

## **E. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Secara umum metode penelitian di artikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat di temukan, di kembangkan, dan di buktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat di

gunakan untuk memahami, memecahkan, dan dapat mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan.<sup>12</sup>

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan lain dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu sebuah penelitian untuk menggambarkan fenomena atau gejala tertentu.<sup>13</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yakni penulis mencari data, meneliti, mengkaji, dan melakukan observasi langsung. Dalam penelitian ini akan menitik beratkan kerja sama bagi hasil pertanian yang dilakukan antara pemilik lahan dan petani di desa Karangsembung kecamatan Songgom kabupaten Brebes, serta praktek bagi hasil yang telah dilakukan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi bagi petani penggarap.

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2014, h.2

<sup>13</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social*, Bandung : Alumni 1986, h.28



## 2. Sumber Data

Sebagai upaya untuk mendapatkan bahan atau data dalam penelitian ini, penyusunan data yang relevan diperoleh dengan cara :

### a. Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan petani penggarap.

### b. Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, *journal*, maupun artikel, dari *website* yang berkaitan dengan penelitian.<sup>14</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara :

### a. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

---

<sup>14</sup> Sulisyanto, *Metode Riset Bisnis*, Yogyakarta : CV Andi Offset 2006, h.137

keterangan.<sup>15</sup> Pada dasarnya terdapat dua jenis wawancara, yakni wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara yang disusun secara terperinci. Wawancara tidak terstruktur yaitu jenis wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Metode wawancara yang dilakukan pada penelitian ini yaitu metode tidak terstruktur supaya luwes dan terbuka. Informan terdiri dari petani penggarap.

b. Metode Dokumentasi

Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, peraturan, dan yang lainnya. Hasil penelitian dari wawancara dan observasi akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi<sup>16</sup>

## **F. Analisis Data**

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Menurut

---

<sup>15</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2015, h.44

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : PT. Rineka Putra 2006, h.227

Bogden dan Biklen (2007) analisis data adalah proses pengaturan dan pengamatan secara sistematis melalui wawancara maupun catatan dan bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman semua hal yang dikumpulkan.<sup>17</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, dan setelah selesai dilapangan. Pada dasarnya analisis dilakukan sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum peneliti terjun ke lapangan dan terus berlangsung hingga penulisan hasil penelitian selesai.

Analisis data sebelum penelitian terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan digunakan untuk fokus penelitian. Namun fokus penelitian masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti terjun langsung di lapangan. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung di lapangan hingga pengumpulan data selesai dalam periode tertentu. Pada saat wawancara berlangsung peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Jika jawaban yang diberikan kurang memuaskan peneliti, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sampai di peroleh data yang dianggap dapat memuaskan peneliti. Aktivitas dalam analisis data kualitatif

---

<sup>17</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta : Bumi Aksara, 2015, h.209

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas.<sup>18</sup>

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu prosedur penelitian yang menggambarkan secara keseluruhan dari fenomena sosial yang ada di daerah penelitian. Dimana data yang diperoleh dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam menganalisa data, penelitian, terlebih dahulu memaparkan data yang diperoleh dari lapangan, mengenai bagaimana pelaksanaan kerjasama *maro* sawah antara pemilik sawah dengan petani penggarap dan apakah *maro* sawah yang dilakukan oleh pemilik sawah dengan petani penggarap dapat meningkatkan pendapatan ekonomi bagi petani penggarap di Desa Karangsembung Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan gambaran dan pemahaman yang sistematis, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan skripsi.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h.211

Bab kedua landasan teori, berisi *mukhabarah* meliputi (definisi akad mukhabarah, dasar hukum akad *mukhabarah*, rukun dan syarat *mukhabarah*, akibat dari akad *mukhabarah*, berakhirnya akad *mukhabarah*, serta hikmah dari *mukhabarah*), teori sekilas tentang petani penggarap meliputi (definisi petani dan pertanian, bentuk pertanian, serta bagi hasil pertanian), dan teori pendapatan (definisi pendapatan serta produksi dan biaya usaha tani)

Bab ketiga, berisi gambaran umum obyek penelitian. Deskripsi ini tentang data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Karangsembung Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, data tersebut meliputi : demografi desa (letak geografis, kondisi masyarakat, kondisi sosial ekonomi, kondisi sosial pendidikan, dan kondisi pemeritah desa), praktik kerjasama *maro* sawah, serta peningkatan pendapatan ekonomi bagi petani penggarap.

Bab keempat, berisi analisis dan pembahasan, meliputi analisis pelaksanaan kerjasama *maro* sawah di Desa Karangsembung Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, analisis peningkatan pendapatan bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh pemilik sawah dengan petani penggarap dapat meningkatkan pendapatan ekonomi bagi petani penggarap, serta analisis alasan petani penggarap mempertahankan kerjasama *maro* sawah.

Bab kelima, berisi kesimpulan dari penelitian, saran, dan penutup.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Mukhabarah*

##### 1. Definisi Akad *Mukhabarah*

Akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang memiliki arti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Sedangkan menurut istilah, akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul yang berdasarkan dengan syariat, yang menyebabkan adanya akibat hukum dalam suatu objek perjanjian. Berdasarkan definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa suatu perjanjian harus disetujui dan diikuti oleh kedua belah pihak yang keduanya terikat dalam hal yang diperjanjikan tersebut.

*Mukhabarah* memiliki makna yang sama dengan *muzara'ah*. Di mana *muzara'ah* secara bahasa berasal dari bahasa Arab, *az-zar'u*. Kata *az-zar'u* sendiri memiliki dua makna, makna yang pertama ialah *tharh az-zur'ah* yang artinya melemparkan benih atau melemparkan benih ke tanah. Makna yang kedua dari *az-zar'u* adalah *al-inbaat* yang berarti menumbuhkan tanaman.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, h. 68

Menurut Abdul Rahman Ghazaly, *mukhabarah* didefinisikan sebagai bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap. Bentuk kerja sama dalam bidang pertanian bukan hanya dikenal dengan istilah *mukhabarah*, tetapi dalam Islam dikenal juga istilah *muzara'ah* dan *musaqah*.<sup>2</sup> Yang menjadi perbedaan diantara ketiganya adalah sebagai berikut :

- *Muzara'ah*, yaitu bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benih berasal dari pemilik tanah.
- *Mukhabarah*, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benih tanaman berasal dari petani penggarap.

---

<sup>2</sup> Abdul Rachman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana 2012, h.117



- *Musaqah*, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah pohon yang diurusinya.<sup>3</sup>

Dari penjelasan diatas, *mukhabarah* dan *muzara'ah* memiliki banyak kesamaan, yang membedakan hanya terletak dari biaya dan benih tanaman. Dalam *muzara'ah*, biaya dan benih tanaman berasal dari pemilik lahan, sedangkan dalam *mukhabarah* biaya dan benih berasal dari petani penggarap.

## 2. Dasar Hukum Akad *Mukhabarah*

Dasar hukum *mukhabarah* adalah sebagai berikut :

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an Surah Az-Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan

---

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada 2010, h. 154

*sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.*<sup>4</sup>

Ayat menegaskan bahwa penganugrahan rahmat Allah, apalagi pemberian wahyu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia, apakah mereka yang musyrik, durhaka, dan bodoh itu yang dari saat ke saat dan secara bersinambuga membagi-bagi rahmat Tuhan pemelihara dan pelimpah rahmat bagimu, wahai nabi yang agung, tidak kami telah membagi melalui penetapan hukum-hukum kami tetap kan antara mereka serta berdasar kebijaksanaan kami baik yang bersifat umum maupun khusus kami telah membagi-bagi sarana kehidupan dalam kehidupan dunia karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan kami telah meningkatkan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain peninggian beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain sehingga mereka dapat tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penggunaan kata *Rabbika* yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan terjemah*, Bandung : CV Diponegoro 2010, h. 491

*ma'isyatahum*/penghidupan mereka, terambil dari kata *'aisy* yaitu kehidupan yang berkaitan dengan hewan dan manusia di dunia ini. *Ba'dhuhum ba'dhan*/sebagian kamu atas sebagian yang lain mencakup semua manusia. Misalnya, sikaya membutuhkan kekuatan fisik si miskin, dan simiskin membutuhkan uang si kaya.<sup>5</sup>

Adapun dalam ayat lain, di sebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Muzammil ayat 20.

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَافِيَةً مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يَقْدَرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عِلْمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَأْتِبَ عَلَيْكُمُ الْفَقْرُ مَا تَيْسَّرُ مِنَ الْقُرْآنِ عِلْمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَعَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَعَاخِرُونَ يَقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَأْ مَا تَيْسَّرُ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

*Artinya* : “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan

---

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 12, Jakarta : Lentera hati, 2010, h. 240-241

*ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>6</sup>*

Ayat diatas menuntun umat manusia untuk menelusuri jalan Allah. Ini boleh jadi menjadikan sementara orang memberatkan dirinya dalam beribadah ataukah memberatkan orang lain. Ayat di atas mengisyaratkan hendaknya orang bersikap moderat, agar tidak memikul beban yang berat. Allah SWT yang maha bijaksana itu selalu mengetahui bahwa aku ada diantara kamu orang-orang berjalan dimuka bumi, bepergian untuk meninggalkan tempat tinggalnya, untuk mencari

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h.574

sebagian karunia Allah. Baik keuntungan perniagaan atau perolehan ilmu.<sup>7</sup>

b. *Hadits*

Dalam *Hadits* disebutkan

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرِعْهَا فَلْيَزْعُرْهَا أَخَا هُوَ (رواه البخاري)

Artinya: “Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.” (*Hadits Riwayat Bukhari*).<sup>8</sup>

Ulama yang memperbolehkan *mukhabarah* ini di perkuat pendapatnya oleh Nawawi, Ibnu Munzir, dan Khattabi, mereka di katakan telah mengambil alasan dari hadis Ibnu Umar sebagai berikut:

عَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ مِلْكٌ فَلْيَزْرِعْهُ خَيْرٌ بِشَرْطٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه البخاري)

Artinya : “Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan

---

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Op.Cit*, h.429-430

<sup>8</sup> Achmad Sunarto dan Syamsudin, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, Jakarta Timur : Annur Press, 2008, h. 227

*pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman” (Hadits Riwayat Bukhari)<sup>9</sup>*

Dalil Al-Qur'an atau *hadits* tersebut diatas merupakan landasan hukum yang dipakai oleh para ulama yang membolehkan akad perjanjian *mukhabarah*. Menurut para ulama akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu mengerjakan tanahnya, sedang petani tidak mempunyai tanah atau lahan pertanian.<sup>10</sup>

Terdapat perbedaan pendapat antar ulama terkait *mukhabarah* ini. dalam Fiqh Islam dijelaskan terdapat beberapa ulama yang membolehkan, tapi ada juga yang melarang. Ulama yang melarang *mukhabarah* ini beralasan pada hadits dalam kitab hadits Bukhari dan Muslim, diantaranya:

عَنْ رَفِيعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَرِ حَقًّا فَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ فَرَمْنَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَفَنَهَا نَا عَنْ ذَلِكَ  
(رواه البخاری)

*Artinya : “Rafi’ bin Khadij berkata, “Di antara Ansar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah*

---

<sup>9</sup> Muhammad faud Abdul Baqi, *AL-Lu'lu' Wal Marjan, mutiara hadits Sahih Bukhari dan Muslim*, Jakarta Timur :Ummul Qura, 2013, h. 687

<sup>10</sup> Nasrun, *Fiqh Muamalah, Op.Cit*, h.277

*untuk kami dan sebagian untuk mereka yang mengerjakannya. Kadang-kadang sebagian tanah itu berhasil baik, dan yang lain tidak berhasil. Oleh karena itu, Rasulullah Saw. Melarang paroan dengan cara demikian.” (Hadits Riwayat Bukhari)<sup>11</sup>*

*Hadits* yang melarang ini dimaksudkan apabila penghasilan dari sebagian tanah diharuskan menjadi milik salah seorang diantara keduanya (pemilik tanah atau penggarap). Karena orang-orang pada masa dahulu memarokan tanah dengan syarat akan mengambil penghasilan dari sebagian tanah yang lebih subur, persentase bagian masing-masing pun tidak diketahui. Keadaan inilah yang dilarang oleh Rasulullah lantaran pekerjaan yang demikian bukanlah dengan cara adil.

Dalam pandangan Abu Hanifah dan Zufar, pendapatan penggarap disebut upah (*ujroh*). Oleh karena itu, ketentuan ini dianalisis dari segi teori akad *ijarah*, *ujrah* harus ada pada saat melakukan akad. Sementara *ujrah* yang berasal dari pengelolaan kerja sama bagi hasil pertanian bersifat *jahalah* (tidak diketahui kadarnya)

---

<sup>11</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islami*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000, h.302

bahkan berpotensi mengakibatkan *Al-in'idam* (tidak ada hasil sama sekali) misalnya gagal panen.<sup>12</sup>

### 3. Hal-hal yang Terkait dengan Akad *Mukhabarah*

#### a. Rukun *Mukhabarah*

Jumhur ulama yang membolehkan aka *mukhabarah* mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun *mukhabarah* menurut mereka sebagai berikut :

##### - Pemilik Tanah

Istilah kepemilikan diambil dari kata milik yang berarti kepunyaan, yaitu sesuatu yang dipunyai karena hal-hal yang menyebabkan kepemilikannya. Kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang control terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi.

Jadi, pemilik tanah adalah seseorang yang mempunyai hak penuh terhadap tanah yang dimilikinya dan dapat digunakan untuk tujuan pribadi. Dalam hal ini, pemilik lahan merupakan seseorang yang menyerahkan lahan yang dimilikinya kepada

---

<sup>12</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Akad Syirkah dan Mudharabah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012, h.262-263



petani penggarap agar dikelola sebagaimana mestinya.

- Petani Penggarap

Petani adalah seseorang yang bergerak dalam bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri maupun menjualnya kepada orang lain. Dalam hal ini petani merupakan seseorang yang mampu melakukan penggarapan tanah yang akan dijadikan sebagai objek akad *mukhabarah*.

- Objek *Mukhabarah*, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani.

- *Ijab* dan *Qabul*

*Ijab* adalah ungkapan penyerahan lahan oleh pemilik lahan kepada petani penggarap, sedangkan *qabul* adalah pernyataan menerima lahan untuk dioalah oleh petani penggarap.

Secara sederhana *ijab* dan *qabul* cukup dengan lisan saja. Namun sebaliknya dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama, termasuk bagi hasil (presentase kerja sama tersebut).

b. Syarat-syarat *Mukhabarah*

Syarat *mukhabarah* ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan pertanian dan hasil panen. Adapun syarat-syarat *mukhabarah* menurut jumhur ulama sebagai berikut :

- Syarat yang menyangkut orang yang berakad : keduanya harus sudah *baligh* (dewasa) dan berakal.
- Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus : diketahui jenis dan sifat tanamannya, tanaman yang akan ditanam adalah yang menghasilkan atau dapat diambil manfaatnya dengan jelas, sehingga tidak sia-sia nantinya, dan tanaman bias tumbuh dilahan yang tersedia.
- Syarat yang menyangkut lahan pertanian yakni :
  - 1) Menurut adat di kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan, jika tanah tersebut tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan lahan pertanian, maka akad *mukhabarah* tersebut tidak sah.
  - 2) Batas-batas lahan tersebut jelas.
  - 3) Lahan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Ini berarti bahwa pemilik lahan mengamanahkan sepenuhnya pengurusan lahan dan tanamannya kepada penggarap agar lebih bebas dalam bekerja.

4) Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut : Pertama, pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas, dimana pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan yang dibuat diawal akad.

Kedua, hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.

Ketiga, pembagian hasil panen itu ditentukan : setengah. Sepertiga, atau sperempat sejak awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak.

Sayarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak mula, karena akad *mukhabarah* mengandung makna *al-ijarah* (sewa-menyewa) dengan imbalan sebagian hasil upah)<sup>13</sup>

c. Akibat dari Akad *Mukhabarah*

Apabila semua syarat dalam akad *mukhabarah* telah terpenuhi, maka terbentuklah akad yang benar. Kemudian akan timbul akibat dari terpenuhi syarat-syarat tersebut sebagai berikut :

---

<sup>13</sup> Ghazaly, dkk, *Fiqh*, h. 115

- 1) Bagi penggarap untuk bertanggung jawab atas pengelolaan lahan dan segala yang dibutuhkan oleh tanaman, dari segi penumbuhan, penyiraman dan penjagaan tanaman.
- 2) Pajak bumi ditanggung oleh pemilik lahan, bukan kepada penggarap. Ia juga tidak boleh disyaratkan kepada penggarap lahan, atau diambil dari hasil pertanian kemudian sisa dari potongan tersebut dibagi untuk kedua belah pihak.
- 3) Segala pembiayaan dalam pertanian menjadi tanggung jawab kedua belah pihak, sebagaimana bagian dari hak mereka, misalnya pembelian pupuk, membersihkan rumput yang mengganggu,, keduanya juga bertanggung jawab atas upah panen, dan upah membawa hasil panen ke gudang. Karena semua hal ini bukan termasuk dari pekerjaan penggarap semata, kecuali bila penggarap ingin mengerjakannya sendiri.
- 4) Karena kedua belah pihak berhak atas pembagian hasil pertanian sesuai dengan perjanjian keduanya, maka bagi kedua pihak untuk membawa dan menjaga hasil panen masing-masing setelah pembagian presentasi.
- 5) Apabila penggarapan ini gagal, maka kedua belah pihak tidak mendapat apapun dari *mukhabarah*

tersebut. Dimana penggarap tidak mendapat upah dari pekerjaannya, begitu pula pemilik lahan tidak mendapat bagian dari penggarapan lahan tersebut.

d. Berakhirnya Akad *Mukhabarah*

Para ulama *fiqh* yang membolehkan akad muzara'ah mengatakan bahwa akad ini akan berakhir apabila:

- 1) Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad. Oleh sebab itu, dalam
- 2) Menunggu panen itu, menurut jumhur ulama, petani berhak mendapatkan upah sesuai dengan upah minimal yang berlaku bagi petani setempat. Selanjutnya, dalam menunggu masa panen itu biaya tanaman, seperti: pupuk, biaya pemeliharaan, dan pengairan merupakan tanggungjawab bersama pemilik tanah dan petani, sesuai dengan prosentase pembagian masing-masing.
- 3) Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad mukhabarah berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad ijarah tidak boleh diwariskan. Akan

tetapi ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad mukhabarah itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu, akad tidak berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad.

- 4) Adanya *udzur* salah satu pihak, baik dari pemilik tanah maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak boleh melanjutkan akad mukhabarah itu. *Udzur* dimaksud antara lain adalah:
- 5) Pemilik tanah terbelit utang, sehingga tanah pertanian itu harus ia jual, karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi utang itu. Pembatalan ini harus dilaksanakan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi, apabila tumbuh-tumbuhan itu telah berbuah, tetapi belum layak panen, maka tanah itu tidak boleh dijual sampai panen.
- 6) Adanya *udzur* petani, seperti sakit atau harus melakukan suatu perjalanan ke luar kota, sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.<sup>14</sup>

e. Hikmah *Mukhabarah*

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, sapi, kuda, dan yang lainnya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah.

---

<sup>14</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama 2000, h 280-281

Sebaliknya, banyak diantara manusia mempunyai sawah, tanah, ladang, dan lainnya, yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan suatu apapun.

Mukhabarah disyari'atkan untuk menghindari adanya pemilikan hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak ada tanah untuk diolah dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak diproduksi karena tidak ada yang mengolahnya.

Mukhabarah terdapat pembagian hasil. Untuk hal-hal lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan *Syirkah* yaitu konsep kerja sama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.

Hikmah lainnya adalah menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenangan antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan (orang miskin). Walaupun tentunya islam tidak menganjurkan

kesamaan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antara orang perorangan.<sup>15</sup>

## **B. Petani Penggarap**

### **1. Definisi Petani dan Pertanian**

Definisi petani dapat didefinisikan sebagai pekerjaan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya guna memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan peralatan yang bersifat tradisional dan *modern*. Secara umum pengertian dari pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk di dalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan dan juga kehutanan. Petani dalam pengertian yang luas mencakup semua usaha kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikroba) untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit, petani juga diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim.

Petani adalah orang yang mengusahakan/mengelola usaha pertanian baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan,

---

<sup>15</sup> Suhendi, *Fiqh*, h.159-160



perburuan dan perikanan. Petani tanaman dapat merupakan petani pemilik atau petani penggarap sesuai dengan yang dikemukakan Patong (1986) dalam (Hamidah, 2014:14) tentang klasifikasi petani :

a. Petani pemilik

Petani pemilik ialah golongan petani yang memiliki tanah dan ia pulalah yang secara langsung mengusahakan dan menggarapnya. Semua faktor-faktor produksi, baik berupa tanah, peralatan dan sarana produksi yang digunakan adalah milik petanisendiri. Dengan demikian ia bebas menentukan kebijaksanaan usahatannya, tanpa perlu dipengaruhi atau ditentukan oleh orang lain. Golongan petani yang agak berbeda statusnya ialah yang mengusahakan tanahnya sendiri dan juga mengusahakan tanah orang lain (*part owner operator*). Keadaan semacam ini timbul karena persediaan tenaga kerja dalam keluarganya banyak. Untuk mengaktifkan seluruh persediaan tenaga kerja ini, ia mengusahakan tanah orang lain.<sup>16</sup>

b. Petani Penyewa

Petani penyewa ialah golongan petani yang mengusahakan tanah orang lain dengan jalan menyewa

---

<sup>16</sup> Ardianto Mokodongan dkk, *Analisis Pendapatan Petani Penggarap pada Usaha Tani Padi Sawah di Desa Kalele Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi*, e-J.Agrotekbis vol.4 no.3 Juni 2016

karena tidak memiliki tanah sendiri. Besarnya sewa dapat berbentuk produksi fisik atau sejumlah uang yang sudah ditentukan sebelum penggarapan dimulai. Lama kontrak sewa ini tergantung pada perjanjian antara pemilik tanah dan penyewa. Jangka waktu dapat terjadi satu musim, satu tahun, dua tahun atau jangka waktu yang lebih lama. Dalam sistem sewa, resiko usahatani hanya ditanggung oleh penyewa. Pemilik tanah menerima sewa tanahnya tanpa dipengaruhi oleh resiko usahatani yang mungkin terjadi.

c. Petani Penggarap

Petani penggarap adalah golongan petani yang mengusahakan tanah orang lain dengan sistem bagi hasil. Dalam sistem bagi hasil, usahatani ditanggung oleh pemilik tanah dan penggarap. Besarnya bagi hasil tidak sama untuk tiap daerah. Biasanya bagi hasil ditentukan oleh tradisi daerah-daerah masing-masing. Kelas tanah banyaknya permintaan dan penawaran serta pengaturan negara yang berlaku.

Petani penggarap tidak mempunyai sawah sendiri, tetapi mengolah sawah milik orang lain dengan system sewa atau bagi hasil. Mereka bukan pemilik sawah, tetapi merupakan orang yang diberi kepercayaan untuk menggarap agar sawah bisa menghasilkan sesuatu. Dalam sistem bagi hasil, resiko usaha tani ditanggung

oleh pemilik tanah dan penggarap. Besarnya bagi hasil tidak sama untuk tiap daerah. Biasanya bagi hasil ini ditentukan oleh tradisi daerah-daerah masing-masing, kelas tanah, kesuburan tanah, banyaknya permintaan dan penawaran, dan peraturan negara yang berlaku. Pertanian memiliki arti penting dalam pembangunan perekonomian. Sektor pertanian tidak saja sebagai penyedia kebutuhan pangan, melainkan sumber kehidupan. Pertanian merupakan sumber pendapatan ekspor serta pendorong dan penarik tumbuhnya sektor-sektor ekonomi, dapat meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, mengatasi kemiskinan dan serta dapat mensejahterakan masyarakat.<sup>17</sup>

## 2. Bentuk Pertanian

Mengingat negara Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya sebagai petani maka memiliki beberapa bentuk pertanian diantaranya :

- a. Sawah, sawah adalah suatu bentuk pertanian yang dilakukan di lahan basah dan memerlukan banyak air baik sawah irigasi, sawah lebak, sawah tadah hujan maupun sawah pasang surut.
- b. Tegalan, tegalan adalah suatu daerah dengan lahan kering yang bergantung pada pengairan air hujan,

---

<sup>17</sup> *Ibid*

ditanami tanaman musiman atau tahunan dan terpisah dari lingkungan dalam sekitar rumah. Lahan tegalan tanahnya sulit untuk dibuat pengairan irigasi karena permukaan yang tidak rata. Pada saat musim kemarau lahan tegalan akan kering dan sulit untuk ditumbuhi tanaman pertanian.

- c. Pekarangan, perkarangan adalah suatu lahan yang berada di lingkungan dalam rumah yang dimanfaatkan untuk ditanami tanaman pertanian seperti sayuran dan kacang-kacangan.
- d. Ladang Berpindah, ladang berpindah adalah suatu kegiatan pertanian yang dilakukan di banyak lahan hasil pembukaan hutan atau semak di mana setelah beberapa kali panen / ditanami, maka tanah sudah tidak subur sehingga perlu pindah ke lahan lain yang subur atau lahan yang sudah lama tidak digarap.
- e. Tanaman Keras, tanaman keras adalah suatu jenis varietas pertanian yang jenis pertaniannya adalah tanaman-tanaman keras seperti karet, kelapa sawit dan coklat.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Johan Iskandar, *Metodologi Memahami Petani dan Pertanian*, Jurnal Analisis Sosial, vol.11, No.11. 1 April 2006

### 3. Bagi Hasil Pertanian

Dalam praktik tradisional kerja sama pengolahan tanah pertanian di Indonesia, skema bagi hasil yang ditetapkan antara pemilik dan penggarap lahan dapat dilihat dari nama atau istilah yang disematkan pada perjanjian bagi hasil yang diterapkan. Skema atau perjanjian bagi hasil tersebut berbeda-beda pada masing-masing daerah. Di Minangkabau misalnya disebut: memperduai, di Minahasa: tojo, di Jawa Tengah dan Timur: maro atau mertelu, di Priangan: nengah atau jejuron, di Lombok.

Beberapa daerah menggunakan istilah yang sejatinya merujuk pada proporsi bagi hasil yang digunakan pada perjanjian. Maro (Jawa), Paron (Madura), Memperduai (Minangkabau), dan Nengah (Sunda) memiliki makna yang sama yaitu bagi hasil tanah dengan membagi  $\frac{1}{2}$  hasil panen kepada pemilik tanah dan  $\frac{1}{2}$  sisanya kepada penggarap. Demikian pula mertelu (Jawa), menigai atau mepertigai (Minangkabau), dan juron (sunda) mengandung makna bagi hasil tanah dengan membagi  $\frac{2}{3}$  hasil panen kepada pemilik lahan dan  $\frac{1}{3}$  sisanya kepada penggarap. Beberapa daerah menggunakan istilah yang lebih umum yang tidak merujuk pada proporsi bagi hasil secara spesifik. Variasi dari skema bagi hasil pertanian ini tak terbatas sesuai dengan praktik, kebiasaan dan hukum adat yang berlaku pada tiap-tiap daerah. Namun demikian skema 1:1 atau 50:50 dan skema

1:2 atau 1/3 merupakan skema bagi hasil yang paling umum diterapkan.<sup>19</sup>

Bagi hasil pertanian adalah suatu ikatan atau perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Upah dari penggarapan lahan tersebut diambil atau diberikan dari hasil pertanian yang diusahakan, setelah selesa panen atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ketika pertama kali mengadakan transaksi. Besarnya bagi hasil adalah besarnya upah yang diperoleh oleh setiap petani baik pemilik lahan maupun penggarap berdasarkan perjanjian atau kesepakatan bersama.

Regulasi sistem bagi hasil dari pemerintah merupakan intervensi terhadap pasar ketenagakerjaan di pedesaan, dengan tujuan memberikan perlindungan kepada penggarap dan pemilik tanah sekaligus. Bagi hasil yang berlaku pada suatu wilayah merupakan sebuah bentuk kelembagaan yang telah diakui dan diterima secara sosial.

Pada saat ini ditemukan ada tiga bentuk hubungan kerjasama antara petani penggarap dan pemilik tanah sebagai dampak dari komersialisasi dan modernisasi pertanian. *Pertama*, sistem mawah tipe satu dimana petani penggarap menyediakan tenaga kerja sejak pengolahan tanah sampai

---

<sup>19</sup><https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12854/Skema-Bagi-Hasil-pada-Kerja-Sama-Usaha-dan-Pemanfaatan-Barang-Milik-Negara.html/> diakses pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 09.20 WIB

perontokan dan pembersihan padi, sedangkan pemilik tanah berkontribusi tanah dan sarana produksi (bibit, pupuk, dan pestisida). Hasil produksi yang diperoleh dibagi dengan perbandingan 1 : 1 atau bagi dua bagian sama rata. *Kedua*, sistem mawah tipe dua dimana pemilik tanah hanya menyediakan tanah sedangkan tenaga kerja dan saprodi lainnya diusahakan petani penggarap. Pada sistem ini, hasil produksi yang diperoleh dibagi tiga bahagian, satu bahagian untuk pemilik tanah dan dua bahagian untuk petani penggarap. *Ketiga*, sistem kontrak (*contract*) dimana petani penggarap disudutkan pada pilihan harus menyewa tanah dengan harga tertentu kepada pemilik tanah. Sewa ini terpaksa diambil karena faktor kelangkaan tanah dan tidak tersedia pekerjaan lain bagi petani penggarap.

Undang-undang yang mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil perlu diadakan agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik. Semua ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian telah tercantum dalam undang-undang Nomor 2 tahun 1960. Dalam pasal 3 dinyatakan undang-undang tentang bentuk perjanjian bagi hasil pertanian yaitu :

1. Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendirisecara tertulis dihadapkan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Kepala Desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.
2. Perjanjian bagi hasil termaksud dalam ayat 1 di atas memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Camat".
3. Pada tiap kerapatan desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir.

Menteri Muda Agraria menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 di atas. Dalam pasal 3 juga disebutkan tentang hak dan kewajiban pemilik lahan dan penggarap, yaitu :

Pemilik dan penggarap berhak untuk :

1. Menjaga kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam pengelolaan lahan dan hasil produksi.



2. Menentukan jenis tanaman dan varietas yang akan ditanam dan penggunaan teknologi lainnya yang berkaitan dengan peningkatan produksi.
3. Mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi pertanaman yang diusahakan.
4. Mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa secara adil.

Kewajiban pemilik lahan adalah :

1. Beritikad baik dalam melakukan transaksi.
2. Melakukan transaksi bagi hasil sesuai pedoman bagi hasil yang telah ditetapkan.
3. Menanggung biaya sarana produksi dan biaya wajib lainnya yang digunakan selama dalam proses produksi

Kewajiban penggarap adalah :

1. Beritikad baik dalam melakukan transaksi.
2. Melakukan transaksi bagi hasil sesuai pedoman bagi hasil yang telah ditetapkan.
3. Menanggung biaya selama proses produksi dan sarana dalam pengolahan tanah penanaman, pemeliharaan (penyiangan, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit termasuk herbisida).

Terkadang terdapat hal-hal yang menjadi masalah dalam sistem bagi hasil seperti pelanggaran yang tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya sehingga hal ini menjadi suatu masalah yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Dengan

adanya keadaan tersebut maka perlu diperhatikan pasal yang mengatur tentang situasi tersebut yaitu tercantum dalam pasal 13 yang berbunyi :

1. Jika pemilik dan atau penggarap tidak memenuhi atau melanggar ketentuan dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 maka baik Camat maupun Kepala Desa atas pengaduan salah satu pihak ataupun karena jabatannya, berwenang memerintahkan dipenuhi atau ditaatinya ketentuan yang dimaksudkan itu.
2. Jika pemilik dan/atau penggarap tidak menyetujui perintah Kepala Desa tersebut pada ayat 1 di atas, maka soalnya diajukan kepada Camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah pihak.

Dalam pasal 4 dijelaskan tentang jangka waktu perjanjian bagi hasil pertanian yang menjadi sangat penting dalam pelaksanaan kerjasama tersebut yaitu :

1. Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan di dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 tahun dan bagi tanah kering sekurangkurangnya 5 tahun.
2. Dalam hal-hal yang khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, oleh Camat dapat diizinkan diadakannya perjanjian bagi hasil dengan jangka waktu yang kurang dari apa yang ditetapkan dalam ayat 1 di

atas, bagi tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyainya.

3. Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil di atas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai dipanen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun.
4. Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu sawah atau tanah kering, maka kepala desalah yang memutuskan.<sup>20</sup>

### **C. Pendapatan**

#### **1. Definisi Pendapatan**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).<sup>21</sup> Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba. Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa

---

<sup>20</sup> Ely Astuti Pane, Skripsi “*Sistem Bagi Hasil dan Pendapatan Petani Padi di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu*”, Bengkulu : Universitas Bengkulu, Bengkulu : 2014

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998, h. 185

dalam periode tertentu. Menurut Reksoprayitno Pendapatan (*revenue*) diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan.

Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pendapatan dari usaha sampingan adalah pendapatan tambahan yang merupakan penerimaan lain dari luar aktifitas pokok atau pekerjaan pokok. Pendapatan sampingan yang diperoleh secara langsung dapat digunakan untuk menunjang atau menambah pendapatan pokok.<sup>22</sup>

Salah satu ukuran keberhasilan usaha tani adalah pendapatan dan keuntungan. Produksi yang tinggi bukanlah satu-satunya hal yang penting, tetapi juga peningkatan pendapatan. Harga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan sedangkan keuntungan dipengaruhi oleh pendapatan dan biaya yang dikeluarkan

---

<sup>22</sup> Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: Bina Grafika, 2004, h.79

selama berusaha tani.

## 2. Produksi dan Biaya Usaha Tani

Produksi adalah total fisik yang diperoleh produsen dalam melakukan kegiatan usaha tani. Dalam memperoleh produksi yang maksimal, seorang petani akan mengalokasikan input dan faktor produksi seefisien mungkin guna tercapainya keuntungan yang maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Faktor Biologi, seperti lahan pertanian dengan tingkat kesuburannya, bibit, varietas, pupuk, obat-obatan, gulma dan sebagainya.
- b. Faktor Sosial Ekonomi, seperti biaya produksi, harga, tenaga kerja, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, resiko ketidakpastian, kelembagaan, tersedianya kredit dan sebagainya.

Biaya usaha tani merupakan nilai semua korbanan ekonomi yang diperlukan dan dapat diukur ataupun diperkirakan untuk menghasilkan suatu produk. Petani sebagai pelaksana mengharap produksi yang lebih besar lagi agar memperoleh pendapatan yang besar pula. Untuk itu, petani menggunakan tenaga, modal dan sarana produksinya sebagai umpan untuk mendapatkan produksi yang diharapkan. Adakalanya produksi yang diperoleh

lebih besar (Suratiah, 2011:60).

Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya biaya dan pendapatan sangatlah kompleks. Namun demikian, faktor tersebut dapat dibagi ke dalam dua golongan sebagai berikut:

- a. Faktor Internal, seperti umur petani, pendidikan, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, jumlah tenaga kerja keluarga, luas lahan, modal. Faktor eksternal seperti, ketersediaan input, harga input, permintaan output, harga output.
- b. Faktor Manajemen, pendapatan usaha tani adalah selisih antara penerimaan (TR) dan semua biaya (TC). Penerimaan usaha tani adalah perkalian antara produksi dan harga jual, sedangkan biaya adalah semua pengeluaran yang digunakan dalam suatu usahatani.

Secara matematis persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$TR = P \cdot Q$$

Keterangan:

TR = Total penerimaan

Q = Produk yang diperoleh dalam suatu usahatani

P = Harga Produksi

Pendapatan terdiri dari pendapatan kotor dan pendapatan bersih. Menurut Soekartawi (1995) pendapatan

kotor usaha tani (*gross farm income*) didefinisikan sebagai nilai produksi total usahatani dalam jangka waktu tertentu baik yang dijual atau yang tidak dijual. Pendapatan bersih (*net farm income*) didefinisikan sebagai selisih pendapatan kotor usahatani dengan pengeluaran total usahatani.

Sedangkan biaya total dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TC = TFC + TVC$$

Keterangan:

$$TC = \text{Total biaya (total cost)}$$

$$TFC = \text{Total Biaya tetap (fixed total cost)}$$

$$TVC = \text{Total Biaya variabel (variable total cost)}$$

Keuntungan petani atau pendapatan bersih adalah selisih antara penerimaan dengan biaya total. Biaya total adalah seluruh biaya yang digunakan dalam berproduksi dari biaya yang dibayarkan. Menurut Soekarwati pendapatan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\pi = TR - TC$$

Keterangan:

$$\pi = \text{Pendapatan usaha tani}$$

$$TR = \text{Total penerimaan (total revenue)}$$

TC = Total biaya (*total cost*)<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Suhardi, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Yogyakarta : Penerbit Gava Media, 2016, h.219



### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Umum Desa Karangsembung**

###### **1. Letak Geografis Desa Karangsembung**

Desa Karangsembung merupakan satu dari sepuluh Desa di Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes. Terletak di dataran rendah dengan tinggi permukaan laut 0-15 m.dpl, dan beriklim tropis, memiliki curah hujan sebesar 156 mm/th dengan jumlah bulan hujan 5:7 bulan, dengan pembagian 5 bulan lembab dan 7 bulan kering.<sup>1</sup>

Desa Karangsembung berada sekitar 15 km sebelah selatan jalur pantura, dengan jarak desa ke kabupaten sekitar 12 km dan 193 km ke ibukota provinsi dan 300 km jarak ke ibukota negara.

Adapun batas-batas wilayah Desa Karangsembung adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kebonagung
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jatirokeh
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Dukuhmaja
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Wanacala

---

<sup>1</sup> Data Geografis Desa Karangsembung Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes tahun 2019.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Nurkholik selaku Sekretaris Desa Sigentong, 8 Nopember 2019, pukul 09.50 WIB.

Sedangkan luas wilayah Desa Karangsembung adalah 466,975 ha, yang terbagi menjadi empat dusun, yaitu Dusun Sabrang Wetan, Dusun Blok Dukuh, Dusun Jatingarang, dan Dusun Limbangan.

Berikut pembagian luas wilayah di Desa Karangsembung<sup>3</sup>

Tabel 1

Pembagian luas wilayah Desa Karangsembung

No	Jenis Penggunaan	Luas
1	Tanah Pemukiman &	128,231 ha
2	pekarangan	323,401 ha
3	Tanah Persawahan	2,646 ha
4	Tanah Kuburan	2,5 ha
5	Lapangan Olahraga Tanah Prasarana Umum, dll	10,197 ha
	Total luas wilayah	466,975 ha

*Sumber Data : Dokumen RPJM-Desa & RKP-Desa Tahun 2015-2020*

## 2. Kondisi Masyarakat Desa Karangsembung

Masyarakat di Desa Karangsembung memiliki kehidupan yang menjunjung solidaritas dan gotong royong, hubungan antar tetangga pun sangat baik. Ketika salah satu tetangga memiliki sebuah hajat sikap gotong royong yang dipupuk sangatlah tinggi, tolong menolong untuk dapat

---

<sup>3</sup> Data Geografis Desa Karangsembung Kecamatan Songgom Kabupten Brebes tahun 2019

meringankan beban, seperti halnya *slametan*<sup>4</sup> dalam kegiatan ibadah haji, salah satu keluarga yang memiliki hajat meminta tetangga atau masyarakat sekitar untuk mendoakan keluarganya yang sedang melakukan ibadah haji. Berdasarkan data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Menurut Umur per Nopember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Keadaan penduduk berdasarkan jenis kelamin

RW	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	653	615	1268
2	766	685	1451
3	448	380	828
4	628	654	1282
5	644	654	1298
6	462	416	878
7	612	615	1227
8	412	386	798
9	641	641	1282
Jumlah	5267	5047	10314

*Sumber data: Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan umur per tanggal 08 Nopember 2019 oleh Bapak Muhaimin selaku Kasie. Pelayanan*

Dari rekapitulasi data di atas Desa Karangsembung memiliki jumlah penduduk sekitar 10.314 jiwa dengan 32 Rukun Tetangga (RT) dan 9 Rukun Warga (RW). Jumlah laki-laki yang menduduki Desa Karangsembung adalah 5.267

---

<sup>4</sup> Slametan atau syukuran adalah ungkapan terimakasih atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah swt

jiwa dan 5.047 jiwa lainnya adalah perempuan, dan seluruh penduduk Desa Karangsembung berkependudukan Warga Negara Indonesia (WNI).<sup>5</sup>

### 3. Kondisi Sosial Ekonomi

Dilihat dari segi perekonomiannya, masyarakat Desa Karangsembung masih tergolong sebagai masyarakat ekonomi sedang. Sebagian masyarakat Desa Karangsembung bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, dikarenakan kondisi lingkungan yang masih memiliki tanah subur. Para petani Karangsembung lebih banyak menanam padi. Selain menjadi petani, ada pula masyarakat Desa Karangsembung yang menjadi pedagang, guru, karyawan swasta dan bahkan dengan luas ukuran tanah yang sedemikian luas masih ada beberapa yang menjadi pekerja di kota orang dan pekerjaan lain sebagainya.

Adapun rincian mengenai klasifikasi pekerjaan masyarakat Desa Karangsembung adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Klasifikasi Pekerjaan masyarakat Desa Karangsembung

No	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	939	963	1902
2	Mengurus Rumah Tangga	0	866	866
3	Pelajar/Mahasiswa	848	754	1602

---

<sup>5</sup> Data Demografis Desa Karangsembung Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes tahun 2019

4	Pensiunan	10	5	15
5	PNS	19	7	26
6	TNI	1	1	2
7	Kepolisian RI	1	0	1
8	Petani/Pekebun	494	444	941
9	Peternak	4	0	4
10	Nelayan/Perikanan	2	0	2
11	Industri	21	4	25
12	Konstruksi	3	0	3
13	Transportasi	21	0	21
14	Karyawan Swasta	69	24	93
15	Karyawan BUMN	2	0	2
16	Karyawan BUMD	1	0	1
17	Karyawan Honorer	1	1	2
18	Buruh Harian Lepas	23	2	25
19	Buruh Tani/Perkebunan	104	99	203
20	PembantuRumah Tangga	0	4	4
21	Buruh Nelayan/Perikanan	3	1	4
22	Buruh Peternakan	0	1	1
23	Tukang Cukur	1	0	1
24	Tukang Batu	1	0	1
25	Tukang Kayu	1	0	1
26	Tukang Jahit	1	0	1
27	Tukang Gigi	2	0	2
28	Guru	20	9	29
29	Dokter	1	1	2
30	Bidan	0	6	6
31	Perawat	1	3	4
32	Pelaut	1	0	1
33	Sopir	28	0	28
34	Pedagang	46	37	83
35	Perangkat Desa	12	1	13
36	Wiraswasta	2545	1785	4330
	Jumlah	5267	5047	10314

*Sumber data: Laporan Monografi Desa Karangsembung per November tahun 2019 oleh Bapak Muhaimin selaku Kasie. Pelayanan.*

#### 4. Kondisi Sosial Pendidikan

Kualitas seorang anak tergantung dari tingkat pendidikan yang ia tempuh. Dahulu, masyarakat Desa Karangsembung memiliki tingkat kelulusan hanya sebatas tingkat Sekolah Dasar (SD) dan tingkat SLTP tetapi pada saat ini banyak anak yang tamat sekolah dari KB, TK, SD, SLTP, SLTA bahkan dari Perguruan Tinggi. Tidak hanya sekolah formal, anak-anak di Desa Karangsembung juga bersekolah Madrasah pada sore hari setelah sekolah formal dilaksanakan.

#### 5. Kondisi Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Karangsembung yang jumlahnya mencapai 10.314 jiwa merupakan masyarakat yang beragama Islam dan mayoritas menganut aliran Nahdlatul Ulama. Kondisi keagamaan di Desa Karangsembung ini cukup religius, hal ini dibuktikan dengan adanya 1 Masjid dan 32 Musholla.<sup>6</sup>

Untuk kegiatan keagamaan, desa Karangsembung minimal dalam satu tahun sekali mengadakan acara

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Muhaimin, selaku kasie pelayanan sekaligus Tokoh Agama Desa Karangsembung, 08 Nopember 2019, pukul 10.10 WIB

Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) yang diadakan di Masjid Besar Nurul Huda Karangsembung. Adapun kegiatan rutin yang dilakukan masyarakat Desa Karangsembung adalah Tahlil dan Yasinan..<sup>7</sup>

#### 6. Kondisi Pemerintah Desa

Dalam struktur pemerintahan, Desa Karangsembung berada di bawah pemerintahan Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes. Desa Karangsembung sendiri dipimpin oleh seorang Kepala Desa (Lurah) dengan masa jabatan selama 6 tahun dan dipilih kembali dengan cara pemungutan suara. Kepala desa dalam memimpin pemerintahan dibantu oleh Sekretaris Desa dan para staff nya.

### **B. Praktik Kerjasama *Maro Sawah***

Manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari haruslah menggunakan uang, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Maka dari itu manusia harus bekerja untuk bisa menyambung hidupnya, baik sebagai pedagang, petani, buruh tani, pengajar dan sebagainya.

Sebagian masyarakat Desa Karangsembung dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, mereka bekerja sebagai petani,

---

<sup>7</sup> *Ibid*

baik menjadi petani di sawah sendiri maupun di sawah milik orang lain. Salah satu cara yang dilakukan petani penggarap untuk bisa menggarap sawah yaitu dengan cara kerjasama *maro* sawah.

*Maro* Sawah<sup>8</sup> merupakan kerjasama antara pemilik sawah dengan petani penggarap yang mana semua biaya dan keperluan menggarap dari menanam benih sampai memanen dibebankan kepada petani penggarap, termasuk jika mengalami kerugian. Pemilik sawah hanya menyerahkan tanahnya untuk dikelola petani penggarap kemudian menunggu hasil. Akad ini berlangsung sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, adapun secara umum hanya berlangsung sekali panen, jika ingin diperpanjang maka langsung dilanjut pada periode berikutnya.

Praktik *maro* sawah merupakan transaksi yang sangat *familiar* di masyarakat Desa Karangsembung, banyak macam alasan yang dilontarkan oleh kedua belah pihak. Praktik *maro* sawah terjadi karena faktor budaya yaitu adanya kebiasaan transaksi dari zaman dahulu, dari sudut pemilik tanah, *maro* sawah dilakukan karena keterbatasannya dalam mengelola sawah, selain itu dalam urusan administrasinya tidak ribet dan tidak memakan potongan. Sementara dari sudut petani penggarap, *maro* sawah dilakukan karena mereka tidak mempunyai sawah, selain itu juga untuk menambah dalam memenuhi kebutuhan.

---



Bapak Kariri (53) merupakan salah satu responden yang sudah cukup lama menjadi petani penggarap. Beliau menjadi petani penggarap sudah kurang lebih sudah 15 tahun. Saat ini beliau sedang menggarap sawah milik Bapak Abdul Hadi yang luasnya  $\frac{1}{2}$  ha. Beliau menjadi petani penggarap karena tidak memiliki lahan sawah sendiri, selain itu juga untuk kegiatan tambahan.

*“Maro sawah itu orang yang mempunyai sawah menyerahkan sawahnya untuk digarap orang lain, pemilik sawah hanya menunggu sampai menerima panen, semua modal serta biaya operasional ditanggung oleh petani penggarap, jika mengalami rugipun yang menanggung tetap petani penggarap, hanya saja pemilik sawah juga tidak menerima hasil apapun, saya menggarap sawah milik orang lain karena tidak mempunyai sawah sendiri, jika mempunyai sawah sendiri ya saya garap, sistem pembagiannya yakni 2:1, 2 untuk petani penggarap dan 1 untuk pemilik sawah, musim hujan atau panas sama saja pembagiannya, sekarang rendengan (musim penghujan) sudah tidak ada yang mau pembagian 1:1”.*<sup>9</sup>

Tidak jauh berbeda dengan Bapak Kariri, menurut Ibu Sarwinah (55) *maro* sawah juga menyerahkan lahan (sawah) pada orang lain pada waktu tertentu untuk dikelola sementara pemilik sawah menunggu hasil panen untuk dibagi. Beliau menjadi petani penggarap kurang lebih sekitar 6 tahun, beliau menuturkan alasan menjadi petani penggarap karena tidak mempunyai sawah.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Kariri selaku petani penggarap, 10 Nopember 2019, pukul 19.10 WIB

*“Alasan menggarap sawah milik orang lain ya karena tidak mempunyai sawah sendiri, namanya juga usaha, ikhtiar, tidak ada salahnya dicoba yang penting halal, modalnya juga dari mana saja, minta kepada anak, terkadang jika tidak ada ya hutang, pokoknya dari njedil, tandur, matun, nggarem, ndisel misal tidak air, sampai dengan panen menjadi tanggung jawab petani penggarap semua, begitupun misal terjadi kerugian, pemilik sawah tidak tau menau, jika tidak berhasil (gagal panen) malahan saya yang tombok, hilang uang (modal) ya hilang tenaga, si pemilik sawah hanya diam, hanya menunggu sampai dengan siap dipanen kemudian menerima hasil dari maro, tetapi jika pemilik sawah murah hati ya Alhamdulillah dibantu misal gagal panen, misal mengantarkan hasil paroan pulangnya juga dipecingi (dikasih uang) lumayan, pembagiannya 2:1, walaupun pemilik sawah hanya menerima 1/3 bagian, tetapi kan utuh, sementara penggarap diputar kembali untuk modal, terkadang juga tidak cukup untuk menutupi modal jika hasilnya sedikit”*.<sup>10</sup>

Sedangkan, menurut pendapat Ibu Khotimah (45) beliau menggarap sawah karena keturunan, sudah sekitar 20 tahun sejak orang tua beliau. Dari sawah yang digarap beliau ada sedikit berbeda dengan *maro* sawah pada umumnya yang biasa dilakukan masyarakat Desa Karangsembung Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes dikarenakan beliau menggarap sawah milik orang yang bertempat tinggal di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, berbeda kecamatan ternyata sedikit berbeda pula pada kebiasaanya. *Maro*

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Sarwinah selaku petani penggarap, 10 Nopember 2019, pukul 19. WIB

sawah yang dilakukan Ibu Khotimah pembagiannya 4:1, 4 untuk petani penggarap dan 1 untuk pemilik tanah.

*“Iya, saya menggarap sawahnya orang Jatibarang, sudah lama sekitar 20-25 tahunan semenjak bapakku belum meninggal, dan pemilik sawahnya pun orang tua dari yang sekarang saya garap, tadinya beliau memang bersahabat baik dengan bapak saya, beliau sebagai sinder dan bapak saya sebagai mandor, berteman sudah baik, malahan sedikit demi sedikit untuk mengangsur hutang, sekarang ya sawahnya yang memegang anak beliau, maro sawah itu semua menjadi tanggung jawab petani penggarap, pemilik sawah hanya menerima hasil bersih dari maro, tetapi orang Jatibarang sedikit berbeda dengan disini, yakni sistem pembagiannya 4:1, jadi bisa untuk menutup modal”.<sup>11</sup>*

Lamanya beliau menggarap sawah milik orang Jatibarang tersebut memang sudah dari orang tua masing-masing baik dari pemilik sawah maupun petani penggarap. Akadnya tidak ada patokan selama berapa puluh tahun, hanya saja keduanya sudah cocok jadi terus berlanjut, dikarenakan pemilik sawah tidak menetap di Desa Karangsembung jadi lebih enak jika sawahnya digarap oleh orang lain. Disisi lain dulunya orang tua Ibu Khotimah berhutang dengan pemilik sawah, jadi untuk mengangsur sedikit demi sedikit dengan hasil dari *maro* sawah tersebut.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Khotimah selaku petani penggarap, 25 November 2019 pukul 14.20 WIB

### C. Peningkatan Pendapatan Bagi Petani Penggarap

Pendapatan merupakan selisih antara penerimaan dengan total biaya yang dikeluarkan selama satu musim tanam. Pendapatan merupakan pemasukan bagi petani responden untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pada umumnya mereka yang menjadi petani penggarap di Desa Karangsembung Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes tidak menjadikannya sebagai penghasilan utama, melainkan sebagai penghasilan tambahan, karena menurut responden menerima paroan sawah hasilnya sedikit, selain itu tidak pasti masih ada kemungkinan gagal panen.

Menurut Bapak Kariri setiap panen selama ini selalu berhasil dan bisa menutupi modal walaupun sedikit. Beliau menuturkan bahwa jika hanya mengandalkan penghasilan dari *maro* sawah tidak akan mencukupi kebutuhan sehari-hari, mengingat memerlukan waktu 3 bulan untuk menunggu panen. Bagi beliau *maro* sawah dijadikan sebagai pekerjaan sampingan, untuk kesehariannya beliau bekerja sebagai karyawan *ricemill*.

*“Sekarang modalnya kan sudah jelas, misalnya nglektor ¼ ha Rp. 250.000,- ½ ha sudah jelas Rp. 500.000,-, tandur 20 orang dibuat Rp.30.000,- berapa, benihnya 4 kantong masing-masing Rp.55.000,-, njedil 4 orang masing-masing Rp.40.000,-, kalau matun tergantung rumputnya banyak atau ngga belum pasti, biasanya sampai 30 orang, bayare Rp.30.000/orangnya, untuk garam diperlukan 4 kantong untuk 2x memupuk, harganya jika oreo Rp. 95.000,-, jetka Rp. 85.000,- postanya Rp. 105.000,- atan TS Rp.105.000,- itu yang 4 kantong, musim penghujan sama kemarau sma*

*saja, cuma tergantung ada hamanya apa tidak, misal ada ya diobot misal tidak ya tidak usah, biasanya jika tidak ada air itu ndesel, kadangkala 3 hari sekali ndisel, untuk seharinya Rp.150.000,- hasil maro sawah bisa nutup klop Rp.250.000,- selama 3 wulan, itu sudah dihitung modalnya dan mendapatkan segitu, untuk hariannya ya kerja di ricemill, kalua tidak kerja sih modalnya dari mana ?”<sup>12</sup>*

Ibu Sarwinah menuturkan bahwa selama beliau menjadi petani penggarap, tidak selalu berhasil, terkadang juga mengalami kerugian. Untuk kesehariannya beliau menjadi kuli serabutan, begitu juga dengan suaminya Bapak Muratno, selain menjadi kuli beliau juga menjadi tukang becak. Menurut beliau, modal untuk menggarap sawah dari uang tersebut terkadang juga tidak cukup, jika kurang beliau meminta kepada anak atau meminjam uang.

*“Modal untuk  $\frac{1}{4}$  ha paling tidak Rp. 2.000.000,- itu uangnya saja, masalah makanan belum dihitung, itu juga yang kemarin nggarap untuk  $\frac{3}{4}$  ha pengairannya didesel terus ketemunya habis sekitar Rp. 8.000.000,- termasuk ongkos lain-lain, setelah panen malah hasilnya hanya Rp. 6.000.000,- sih boro-boro saya untung, malahan uang saya hilang, tenagapun hilang, jika musim kemarau kebanyakan ruginya, misalkan berhasil tetapi hasilnya sedikit ya saya tetap rugi, misal mau ngulekna uangnya ndadak minta sama anak, saya bekerja juga belum cukup untuk modal, tetapi misal nanti pas panen misal mengantarkan ke pemilik sawah pas punya Hj Waniti pulangnya dipecingi Rp. 50.000,- yang  $\frac{1}{4}$  pas yang  $\frac{3}{4}$  dikasih Rp. 150.000,- jika di Hj Kholifah mah*

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Kariri selaku petani penggarap, 10 November 2019, pukul 19.10 WIB

*boro-boro, musim kemaraupun tidak dibantu diselnnya, makanya kebanyakan orang-orang mengembalikan sawahnya beliau”.*<sup>13</sup>

Semua kebutuhan selama *maro* sawah berlangsung menjadi tanggung jawab petani penggarap, namun terkadang pemilik lahan juga memberikan bonus sebagai rasa terimakasih karena sudah menggarap sawah juga mengantarkan hasil panennya. Tetapi tidak semua pemilik lahan demikian, semua kembali kemurahan hati masing-masing.

Berbicara mengenai pendapatan dalam transaksi *maro* sawah, berikut perhitungannya secara sistematis. Pada bab satu telah disinggung mengenai rincian biaya dan pendapatan bagi petani penggarap (Ibu Sutinah).

#### Pengeluaran

Benih 3 kantong	5 x 55.000	16 5.000
<i>Tandur</i>	10 x 30.000	300.000
<i>Njedil</i>		100.000
Pupuk (Termasuk Upah)		590.000
Matun (Membersihkan rumput)	10 x 40.000	400.000
Pengairan (Plus Sewa Desel)	5 x 200.000	1.000.000
<i>Blower</i> (Saat panen)		500.000
<b>Total</b>		<b>3.040.000</b>

#### Pendapatan

<b>Hasil Bersih</b>	8 kw x 400.000	<b>3.200.000</b>
Petani Penggarap	2/3	2.130.000
Pemilik Sawah	1/3	1.070.000

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu Sarwinah selaku petani penggarap, 10 November 2019, pukul 19.45 WIB

Pada pemaparan diatas kita ketahui mengalami keuntungan sebesar Rp. 160.000,- berikut adalah penjelasannya :  
 Dikarenakan petani penggarap mempunyai keahlian, maka bisa mengurangi biaya operasional, seperti dalam proses pemberian pupuk, sekali memberi membutuhkan biaya tenaga kerja (upah) sebesar Rp. 100.000,- sedangkan dilakukan 2x jadi Rp. 200.000,- .  
 . Begitupun saat pengairan, karena petani mempunyai desel sendiri, jadi tidak menambah biaya sewa, untuk sekali sewa dibutuhkan biaya Rp. 50.000,- untuk 5x desel totalnya Rp. 250.000,-. Yang termasuk biaya tetap : benih, *tandur* (menanam), pupuk, sedangkan biaya variabel yakni: *matun* dan pengairan, *blower* tidak dihitung karena biasanya petani penggarap mempunyai alat sendiri. Produk yang diperoleh dalam panen : 8 kw serta harga produksi : 400.000

Adapun perhitungannya yakni :

1) Total Penerimaan (*Total Revenue*)

$$TR = Q \times P$$

$$TR = 8 \times 400.000$$

$$TR = 3.200.000$$

Jadi total penerimaan dari sawah ¼ ha yakni Rp. 3.200.000,-

2) Biaya Total (*Total Cost*)

$$TC = TFC + TVC$$

$$TC = 995.000 + 1.050.000$$

$$TC = 2.045.000$$

Jadi biaya total yang dikeluarkan untuk sawah yang luasnya  $\frac{1}{4}$  ha dalam sekali musim yakni sebesar Rp. 2.045.000,-

3) Pendapatan Usaha Tani

$$\Pi = TR - TC$$

$$\Pi = 3.200.000 - 2.045.000$$

$$\Pi = 1.115.000$$

Jadi pendapatan dari *maro* sawah selama satu kali panen yakni Rp. 1.15.000,-

Maka pendapatan bersih dari petani penggarap yakni :

Pendapatan bagi hasil - biaya total

$$2.130.000 - 2.045.000 = 85.000$$

Sedangkan menurut pendapat Bapak Kariri yang mengelola sawah garapan seluas  $\frac{1}{2}$  ha, berikut perinciannya :

Pengeluaran

<i>Nlaktor</i>		500.000
<i>Winih</i> (Benih)	55.000 x 4 kantong	220.000
<i>Njedil</i>	40.000 x 4 orang	160.000
<i>Tandur</i> (Menanam)	30.000 x 20 orang	600.000
<i>Matun</i>	30.000 x 30 orang	900.000
Pupuk (pemakaian 2x)		390.000
Upah tenaga mupuk		200.000
<i>Desel</i> (Pengairan)	150.000 x 5	750.000
Sewa <i>desel</i>	50.000 x 5	250.000
<b>Total</b>		<b>3.970.000</b>



Adapun Perhitungannya yaitu :

1) Total Penerimaan (*Total Revenue*)

$$TR = Q \times P$$

$$TR = 16 \times 400.000$$

$$TR = 6.400.000$$

Jadi total penerimaan dari *maro* sawah  $\frac{1}{2}$  ha adalah  
Rp. 6.400.000,-

2) Biaya Total (*Total Cost*)

$$TC = TFC + TVC$$

$$TC = 1.870.000 + 1.650.000$$

$$TC = 3.520.000$$

Jadi biaya total yang dikeluarkan untuk sawah yang  
luasnya  $\frac{1}{2}$  ha dalam sekali musim yakni sebesar Rp.  
3.520.000,-

3) Pendapatan Usaha Tani

$$\Pi = TR - TC$$

$$\Pi = 6.400.000 - 3.520.000$$

$$\Pi = 2.880.000$$

Jadi pendapatan dari *maro* sawah selama satu kali  
panen yakni Rp. 2.880.000,-

<b>Hasil Bersih</b>	16 kw x 400.000	<b>6.400.000</b>
Petani Penggarap	2/3	4.260.000
Pemilik Sawah	1/3	2.140.000

Petani penggarap memperoleh pendapatan bersih sebesar Rp. 740.000,- untuk sekali panen, jika dihitung perbulan menjadi Rp. 246.000,-

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa pendapatan yang diterima oleh petani penggarap sangatlah sedikit, bahkan jauh ddi bawah UMK Kabupaten Brebes, yang jumlahnya Rp. 1.807.614,-

**BAB IV**  
**ANALISIS PENDAPATAN PETANI PENGGARAP DALAM**  
**KERJASAMA *MARO* SAWAH**  
**(STUDI KASUS DI DESA KARANGSEMBUNG**  
**KECAMATAN SONGGOM KABUPATEN BREBES)**

**A. Analisis Praktik Kerjasama *Maro* Sawah di Desa Karangsembung Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes**

Setelah melakukan penelitian di Desa Karangsembung Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, peneliti mendapatkan informasi bahwa, desa Karangsembung terbagi menjadi empat dusun, yakni dusun Sabrang Wetan, dusun Blok Dukuh, dusun Jatingarang, dan dusun Limbangan dengan total luas wilayah 466, 975 Ha. Wilayah Desa Karangsembung terbagi atas pemukiman dan pekarangan, tanah persawahan, tanah kuburan, lapangan olahraga, tanah prasarana umum, dan lain-lain.

Masyarakat Desa Karangsembung telah mengenal bagi hasil tanah pertanian atau *maro* telah membudaya di kalangan masyarakat secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Pemilik sawah yang mempunyai lahan pertanian yang luas, biasanya tidak bisa menggarap semua lahan pertaniannya sendiri, maka pemilik sawah menawarkan kepada orang lain guna mengolah lahan pertanian miliknya dengan cara bagi hasil. Selain itu, ada pula pihak yang sengaja menawarkan diri kepada pemilik

sawah untuk memberikan izin mengolah tanah pertanian miliknya.

Praktik *maro* sawah merupakan suatu transaksi yang menggunakan akad bagi hasil sesuai kesepakatan bersama, dalam ekonomi syari'ah kita sebut dengan *mukhabarah* karena benih dan biaya operasional ditanggung oleh petani penggarap, tetapi dalam praktik tidak murni sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip *mukhabarah*. Dalam *mukhabarah* kerugian menjadi tanggung jawab bersama pemilik sawah dan petani penggarap, namun dalam *maro* sawah di Desa Karangsembung kerugian hanya dibebankan kepada petani penggarap.

Akad perjanjian *maro* sawah yang terjadi di Desa Karangsembung Kecamatan Songgom ini merupakan perjanjian yang benar-benar dilakukan oleh pemilik sawah dan petani penggarap dengan kesungguhan hati. Perjanjian tersebut hanya dilakukan secara lisan, mereka tidak mempersoalkan tentang kerugian-kerugian yang mungkin terjadi. Adanya rasa saling percaya antara pemilik tanah dengan petani penggarap ini sudah lama terjadi. Menurut penulis, perjanjian yang baik adalah perjanjian tertulis, agar dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun secara kekeluargaan. Dengan perjanjian tertulis pula, apabila ada salah satu pihak yang wanprestasi dapat diproses secara hukum mengenai kerugian-kerugian yang ditanggungnya. tetapi apabila perjanjian ini hanya bersifat lisan

saja, tidak menutup kemungkinan sulitnya mencari siapa-siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

Pembagian hasil *maro* sawah memang mudah, dan tidak ribet. Hal inilah yang menjadi daya tarik pemilik sawah untuk menyerahkan sawahnya untuk digarap oleh petani penggarap. Pemilik sawahpun tinggal menunggu hasil panen tanpa harus ribet memikirkan proses pemeliharaan maupun biaya operasional, karena semuanya menjadi tanggung jawab petani penggarap. Adapun pembagiannya yakni menggunakan sistem *maro telu* (menggunakan perbandingan 2 : 1), dimana 2/3 untuk petani penggarap dan 1/3 untuk pemilik sawah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Karangsembung Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, adapun tahapan-tahapan dalam mengelola sawah yakni :

1. *Nlaktor* (Pengolahan Tanah)

Pengolahan tanah merupakan langkah awal dalam melaksanakan serangkaian budidaya padi. Pengolahan tanah ini diharapkan dapat dilakukan sebaik mungkin agar proses penyerapan nutrisi atau zat hara dan air dapat dilakukan secara maksimal sehingga padi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Supriadiputra, Sudirman dan Ade Iwan Setiawan. *Mina padi* : Jakarta: Penebar Swadaya, 2009, h.67

## 2. *Nyebar* (Penyemaian)

Petani biasanya menggunakan benih dari hasil panen sebelumnya untuk ditanam pada musim tanam selanjutnya. Benih tersebut diberi perlakuan sebelum dilakukan persemaian, yaitu direndam dengan air selama 24 jam (24 jam). Benih yang sudah direndam lalu ditiriskan yang nantinya akan disebar pada lahan penyemaian.

## 3. *Njedil*

Setelah benih padi disebar pada lahan penyemaian selama beberapa hari, kemudian di pindah atau diangkat untuk siap ditanam di lahan sawah yang sudah siap, *njedil* yakni proses pemindahan benihnya, biasanya dilakukan H-1 sebelum penanaman.

## 4. *Tandur* (Penanaman)

Penanaman yang dianjurkan pada benih berumur 15-21 hari sebanyak 3-4 batang per lubang dengan jarak tanam 20 x 20 cm.

## 5. *Matun* (Membersihkan Rumput)

*Matun* atau membersihkan rumput dilakukan sesuai dengan kebutuhan, karena tergantung dari kondisi tanaman tersebut, apakah ada rumputnya atau tidak, jika ada seberapa banyak. Pada umumnya dilakukan 1-2 kali selama proses.

## 6. Pemberian Pupuk

Merupakan proses pemberian nutrisi pada tanaman padi agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Pupuk yang digunakan yakni pupuk Phonska, JK, dan TS. Pemberian pupuk dilakukan 2 kali selama proses pertumbuhan, yakni saat umur 7 dan 25 hari.

#### 7. Pengairan

Pemberian air disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dengan mengatur ketinggian genangan. Ketinggian genangan dalam genangan cukup 2-5 cm. Pada saat musim penghujan (*ranteban*) biasanya pengairan langsung dari air hujan, sedangkan pada musim kemarau (*ketiga*) pengairan dilakukan dengan cara

#### 8. Panen

Padi siap di panen sekitar 90 hari setelah ditanam, jika terlambat memanen akan mengakibatkan banyak biji yang tercecer atau busuk sehingga mengurangi produksi. Waktu yang baik untuk panen adalah di pagi hari, saat embun sudah menguap. Selain itu lahan juga dalam kondisi kering tidak basah atau tergenang air.

Padi yang telah dikumpulkan kemudian *digepyok* (dirontokan). *Gepyok* (perontokan) merupakan proses pemisahan bagian yang dimanfaatkan dari bagian yang tidak digunakan. *Gepyok* dilakukan dengan cara dibanting atau menggunakan mesin perontok.

#### 9. Cara Pembagian

Sedangkan cara pembagiannya yakni, pada saat panen petani penggarap mengundang pemilik sawah untuk *mbawoni*. *Mbawoni* merupakan pemilik sawah menyaksikan secara langsung proses pemanenan dan perhitungan terhadap hasil sawah yang digarap oleh petani penggarap, setelah padi *digepyok* (dirontokan), padi dimasukan ke dalam karung yang kemudian dijahit lalu ditimbang. Setelah ditimbang total semua jumlah yang didapat, kemudian dihitung untuk dibagi hasilnya untuk pemilik sawah dan petani penggarap.<sup>2</sup>

#### **B. Analisis Alasan Petani Penggarap Mempertahankan Kerjasama *Maro Sawah* dengan Pemilik Lahan**

Pelaksanaan *maro* sawah yang dilakukan di Desa Karangsembung Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes mempunyai beberapa faktor yang mendukung, diantaranya adalah adanya menurut pemilik sawah yang tidak sempat atau sibuk dengan aktivitasnya sehingga sawah yang dimiliki diharapkan masih dapat memberikan hasil dan tidak mempunyai modal untuk mengolah sawahnya, sudah tua sehingga tidak sanggup jika harus menggarap sawahnya, serta mempunyai sawah di Desa Karangsembung namun pemiliknya menetap di luar desa Karangsembung.

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ibu Sarwinah selaku Petani Penggarap, pada 08 Nopember 2019 pukul 1945 WIB



Menurut petani penggarap pada umumnya melakukan bagi hasil pertanian sawah adalah tidak mempunyai sawah sendiri, selain itu juga faktor ekonomi, karena rezeki itu datang dari mana saja dan sudah diatur, sebagai manusia kita hanya berusaha semampu kita. Pemilik sawah yang notabennya tidak memiliki tanah dan tidak memiliki pekerjaan tetap harus pandai dalam memutar otak agar penghasilan dan kebutuhan keluarganya dapat terpenuhi, maka petani penggarap menawarkan dirinya kepada pemilik sawah untuk bersedia menyerahkan sawahnya untuk *diparo*, entah hasil akhir mau untung ataupun rugi.

Petani penggarap tidak memiliki kekuatan dalam memilih lahan dan besarnya luas lahan yang akan digarapnya. Letak lahan maupun luas lahan yang akan digarap tergantung pada keinginan pemilik lahan. Pada umumnya petani penggarap memiliki kondisi finansial yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan pemilik lahan.

Ada pula yang menuturkan bahwa karena adanya faktor keturunan, dari mulai orang tua sampai sekarang diteruskan oleh anaknya, karena bukan semata-mata *maro* sawah semata, tetapi untuk mengangsur hutang, jadi dari hasil *maro* tersebut sebagian langsung dibayarkan untuk mengangsur hutang yang dimiliki petani penggarap kepada pemilik sawah. Terakhir adalah karena adanya faktor budaya atau tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Karangsembung, sehingga dalam praktik *maro*

sawah ini masyarakat masih melaksanakan kegiatan tersebut dan sulit untuk dihilangkan.

Berdasarkan hasil wawancara, petani penggarap yang merupakan pekerjaan sampingan, mereka bekerja sebagai : pedangan makanan, tukang ojek, serabutan, karyawan *ricemill*, tukang becak, dan lain-lain. Menurut petani penggarap, alasan mereka menjadi petani penggarap adalah sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, karena menurutnya lumayan untuk tambahan karena sebagai petani kita mempunyai keahlian sehingga bisa sebagai modal keahlian, paling tidak sedikit untuk mengurangi biaya pengeluaran.

Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi petani penggarap mempertahankan praktik *maro* sawah di Desa Karangsembung yakni faktor ekonomi sebagai pekerjaan tambahan, mereka memanfaatkan keahlian yang mereka miliki sebagai modal untuk menggarap sawah. Selain itu juga sebagai sara untuk mengangsur hutang yang dimiliki petani penggarap kepada pemilik sawah, Selanjutnya, faktor budaya dan tradisi yang membuat transaksi semacam ini masih dipertahankan, karena mereka sudah jauh mengenal peninggalan tradisi dari nenek moyang yang sudah menjadi kegiatan turun temurun.

### **C. Analisis Peningkatan Pendapatan Kerjasama yang Dilakukan Oleh Pemilik Sawah dan Petani Petani Penggarap dapat Meningkatkan Pendapatan Ekonomi**

Dalam *maro* sawah terdapat pemilik sawah dan petani penggarap dimana keduanya terjalin sebuah kerjasama yang diharapkan dapat memberikan keuntungan dalam peningkatan taraf hidup mereka sehingga kerjasama ini berakibat pada adanya saling ketergantungan atau saling membutuhkan antara pemilik sawah dan petani penggarap. Dimana yang akhirnya berdampak pada pendapatan masing-masing dalam melanjutkan kehidupan rumah tangga tani, sebab sistem *maro* sawah merupakan sarana tolong menolong untuk meningkatkan taraf hidup pemilik sawah dan petani penggarap.

*Maro* sawah adalah suatu ikatan atau kerjasama antara pemilik sawah dengan petani penggarap. Upah dari penggarapan sawah tersebut diambil dari hasil pertanian yang diusahakan, setelah selesai panen atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ketika pertama kali mengadakan transaksi (Irmayanti, 2010).

Ilmu usaha tani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan pada waktu tertentu. Dikatakan efektif apabila petani dapat mengalokasikan sumberdaya yang dimiliki dengan sebaik-baiknya dan dikatakan efisien apabila pemanfaatan

sumberdaya tersebut menghasilkan keluaran (*output*) yang melebihi masukan (*input*).<sup>3</sup>

Salah satu ukuran keberhasilan usaha tani adalah pendapatan dan keuntungan. Produksi yang tinggi bukanlah satu-satunya hal yang penting, tetapi juga peningkatan pendapatan. Harga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan sedangkan keuntungan dipengaruhi oleh pendapatan dan biaya yang dikeluarkan selama berusaha tani. Selain harga luasnya sawah dan musim juga mempengaruhi, karena semakin luas sawah yang digarap semakin besar pula kemungkinan mendapatkan hasil, sedangkan musim jika musim hujan akan sangat membantu petani penggarap, karena bisa mengurangi biaya pengairan sementara musim kemarau secara otomatis pengairan menggunakan desel, sehingga menambah biaya pengeluaran.

Pentingnya analisa usaha tani dilakukan adalah mengingat umumnya petani tidak mempunyai catatan usaha tani. Hal ini sangat penting karena tipe-tipe usaha tani pada setiap skala usaha dan tiap lokasi berbeda satu sama lainnya arena adanya perbedaan karakteristik yang dimiliki usaha tani yang bersangkutan. Fungsi analisa ini penting sebagai salah satu dasar

---

<sup>3</sup> Soekartawi, *Analisis Usahatani*, Jakarta: UI-Press, 1995, h.56

upaya peningkatan produksi dan pendapatan daerah, juga penting untuk menyusun peluang investasi.<sup>4</sup>

Berdasarkan perhitungan pada bab sebelumnya telah diketahui bahwa hasil pendapatan petani penggarap dari *maro* sawah yakni jauh dibawah dari upah minimum kota (UMK) Kabupaten Brebes, oleh karena itu mereka masih bekerja diluar sebagai petani penggarap, jika tidak mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari atau masuk dalam kategori miskin.

Badan Pusat Statistik sebagai institusi yang dipercaya mengeluarkan data terkait indikator kemiskinan mengeluarkan definisi bahwa kemiskinan diukur menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Dengan pendekatan ini , kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Adapun indikator kemiskinan antara lain :

#### 1. Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang mempunyai rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin suatu wilayah diartikan banyaknya penduduk miskin yang terdapat di wilayah tersebut.

---

<sup>4</sup> Moehar Daniel, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2004, h.85

## 2. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan minuman yang setara dengan 2100 kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

## 3. Persentase Kemiskinan (Tingkat Kemiskinan)

Persentase kemiskinan menggambarkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Perhitungan dilakukan dengan rumus tertentu yang menggambarkan persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di suatu wilayah dibandingkan jumlah penduduk di wilayah tersebut.

Biasanya BPS mengadakan pengukuran jumlah dan persentase penduduk miskin dengan survei Susenas (Survei Sosial dan Ekonomi Nasional) serta mengeluarkan data pada Maret dan September tahun yang bersangkutan. Merujuk dari definisi tersebut, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin adalah berbeda. Jumlah penduduk miskin sangat berkorelasi dengan jumlah penduduk, misalnya Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta merupakan provinsi terpadat dengan jumlah penduduk paling banyak otomatis penduduk miskinnya juga paling banyak, dan lebih banyak jika dibandingkan dengan Papua dan NTB sehingga jumlah penduduk miskinnya jika dirangking ketiga provinsi tersebut menempati

urutan teratas. Tetapi jika jumlah penduduk miskin tersebut dipresentase dengan perhitungan BPS hasilnya akan berbeda, provinsi yang paling tinggi persentase kemiskinannya bisa jadi provinsi lain.<sup>5</sup>

Persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41% menurun 0,25 % poin terhadap September 2018 dan menurun 0,41% poin terhadap Maret 2018. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta terhadap September 2018 dan menurun 0,80 juta orang terhadap Maret 2018.

Garis kemiskinan pada Maret 2019 tercatat sebesar Rp. 425.250,-/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp. 313.232,- (73,66%) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp. 112.018,- (26,34%). Pada Maret 2019 secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,68 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata sebesar Rp. 1.990.170,-/rumah tangga miskin /bulan.<sup>6</sup>

---

5

<https://www.kompasiana.com/ellysuryani/575e4ddeef7e612006d33cfd/indikator-kemiskinan>, diakses pada 07 Desember 2019 pukul 17.32 WIB

<sup>6</sup> <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/05/1629/persentase-penduduk-miskin-2019-sebesar-9-41-persentase.html>, diakses pada 07 Desember 2019 pukul 22.20 WIB

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang diperoleh dalam melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pendapatan Petani Penggarap dalam Kerjasama *Maro* Sawah (Studi Kasus di Desa Karangsembung Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes)” dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. *Maro* Sawah merupakan kerjasama antara pemilik sawah dengan petani penggarap yang mana semua biaya dan keperluan menggarap dari menanam benih sampai memanen dibebankan kepada petani penggarap. Praktik pelaksanaan kerjasama *maro* sawah di Desa Karangsembung menggunakan akad bagi hasil sesuai yang berlaku disana, yakni 2:1 dimana 2 untuk petani penggarap dan 1 untuk pemilik sawah. Akad perjanjiannya hanya dilakukan secara lisan, hal tersebut dilakukan karena adanya rasa saling percaya.
2. *Maro* sawah merupakan sarana tolong menolong untuk meningkatkan taraf hidup bagi petani penggarap maupun pemilik tanah. Salah satu ukuran keberhasilan kerjasama *maro* sawah adanya peningkatan pendapatan. Bagi petani penggarap kerjasama *maro* sawah belum cukup untuk meningkatkan pendapatan ekonominya, karena dalam realitanya mereka



masih bekerja di sektor lain untuk menambah pendapatan, baik sebagai tukang becak, karyawan *ricemill*, kuli serabutan, pedagang masakan, tukang ojek, dan lain-lain.

Adapun alasan petani penggarap mempertahankan kerjasama *maro* sawah dengan pemilik sawah yakni karena faktor ekonomi, sebagai pekerjaan tambahan. Mereka tidak mempunyai sawah sendiri untuk dikelola, oleh karena itu mereka mencoba usaha dengan menjadi petani penggarap dengan memanfaatkan keahlian yang mereka miliki. Selain itu ada juga yang dipertahankan karena faktor keturunan, sebagai sarana mengangsur hutang kepada pemilik sawah, juga faktor budaya dan tradisi yang membuat transaksi tersebut masih dipertahankan, karena tradisi tersebut sudah menjadi kegiatan turun temurun.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya perjanjian kerjasama *maro* sawah tidak hanya dilakukan secara lisan tetapi harus ada bukti tertulis, karena perjanjian tersebut agar dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun secara kekeluargaan. Dengan perjanjian tertulis pula, apabila ada salah satu pihak yang wanprestasi dapat diproses secara hukum mengenai kerugian-kerugian yang ditanggungnya.

2. Untuk pemerintah sebaiknya menetapkan persentase atau pembagian hasil dalam kerjasama *maro* sawah, yang sekiranya petani penggarap memperoleh hasil paling tidak sesuai dengan UMK setempat. Petani penggarap sudah mengeluarkan biaya dari benih sampai proses pemanenan sangat disayangkan jika pendapatan tidak sesuai dengan yang dikeluarkan, sementara pemilik sawah hanya menunggu sampai panen tiba sudah mendapatkan hasil yang lebih pasti.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya yang tidak terhitung salah satunya kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada beliau Baginda Rasulullah Muhammad yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan kesempurnaan di masa yang akan datang. Penulis juga berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Amin ya rabbal'alamin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Daniel, Moehar *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2004
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan terjemah*, Bandung : CV Diponegoro 2010
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998
- Faud Abdul Baqi, Muhammad, *AL-Lu'lu' Wal Marjan, mutiara hadits Sahih Bukhari dan Muslim*, Jakarta Timur :Ummul Qura, 2013
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta : Bumi Aksara, 2015
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama) 2000
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Social*, Bandung : Alumni 1986
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin, *Akad Syirkah dan Mudharabah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012
- Narbuko, Cholid, dan Achmadi, Abu *Metode Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2015
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islami*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000
- Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: Bina Grafika, 2004

- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Edisi Indonesia jilid IX (Semarang : Toha Putra) 1998
- Shihab, M. Quraish *Tafsir Al-Misbah*, Volume 12, Jakarta : Lentera Hati, 2010, h. 240-241
- Shoheh Bukhari, yang diambil dalam kutipan buku M. Nashiruddin Al-Bani, *Ringkasan Shoheh Bukhari*, (Jakarta : Gema Insani Press) 2007
- Soekartawi, *Analisis Usahatani*, Jakarta: UI-Press, 1995
- Sudirman, Supriadiputra dan Ade Iwan Setiawan. *Mina padi* : Jakarta: Penebar Swadaya, 2009
- Suhardi, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Yogyakarta : Penerbit Gava Media, 2016
- Suhendi,Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada) 2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2014
- Sulisyanto, *Metode Riset Bisnis*, (Yogyakarta : CV Andi Offset) 2006
- Sunarto, Achmad dan Syamsudin, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, Jakarta Timur : Annur Press, 2008
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia) 2001
- Iskandar, Johan, *Metodologi Memahami Petani dan Pertanian*, Jurnal Analisis Sosial, vol.11, No.11. 1 April 2006
- Mokodongan, Ardianto, dkk, *Analisis Pendapatan Petani Penggarap pada Usaha Tani Padi Sawah di Desa Keleke Kecamatan*

*Dolo Barat Kabupaten Sigi*, e-J.Agrotekbis vol.4 no.3 Juni 2016

Ely Astuti Pane, Ely, Skripsi, *“Sistem Bagi Hasil dan Pendapatan Petani Padi di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu”*, Bengkulu : Universitas Bengkulu, 2014

Jaya Saputra, Ariansyah, Skripsi *“Kerja Sama Pengelolaan Lahan Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di desa Ngulak kecamatan Sangadesa kabupaten Musi Banyuasin”*, Palembang : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016

Nur Al Farizi, Ahmad, Skripsi, *Analisis Pendapatan Petani Padi di desa Kotasari kecamatan Pusakanegara kabupaten Subang*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia , 2018

Syahwil Nasution, Erwin, Skripsi, *Analisis Pendapatan Petani Penggarap pada Usaha Tani Padi Sawah (Oryza sativa) di desa Muara Siambak kecamatan Kotanopan kabupaten Mandailing Natal*, Padang : Universitas Andalas, 2016

<http://gagasanhukum.wordpress.com/2015/05/05/siapa-peduli-nasib-buruh-tani/>, diakses pada 19 Oktober 2019 pukul 22.14 WIB

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12854/Skema-Bagi-Hasil-pada-Kerja-Sama-Usaha-dan-Pemanfaatan-Barang-Milik-Negara.html/> diakses pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 09.20 WIB

<https://www.kompasiana.com/ellysuryani/575e4ddeef7e612006d33cfd/indikator-kemiskinan>, diakses pada 07 Desember 2019 pukul 17.32 WIB

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/05/1629/presentase-penduduk-miskin-2019-sebesar-9-41-persem.html>, diakses pada 07 Desember 2019 pukul 22.20 WIB

Data Geografis Desa Karangsembung Kecamatan Songgom  
Kabupaten Brebes tahun 2019

Wawancara dengan Bapak Nurkholik selaku Sekretaris Desa  
Sigentong, 8 Nopember 2019, pukul 09.50 WIB

Wawancara dengan Bapak Muhaimin, selaku kasie pelayanan  
sekaligus Tokoh Agama Desa Karangsembung, 08 Nopember  
2019, pukul 10.10 WIB

Wawancara dengan Ibu Kariri selaku petani penggarap, 10 Nopember  
2019, pukul 19.10 WIB

Wawancara dengan Ibu Sarwinah selaku petani penggarap, 10  
Nopember 2019, pukul 19.45 WIB

Wawancara dengan Ibu Khotimah selaku petani penggarap, 25  
November 2019 pukul 14.20 WIB

## **LAMPIRAN**

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia :

Alamat :

## **DAFTAR PERTANYAAN**

Wawancara dengan Petani Penggarap

1. Bagaimana bagi hasil "*maro sawah*" itu ?
2. Sudah berapa lama bapak / ibu menjadi petani penggarap ?
3. Faktor apa yang mendorong bapak / ibu untuk menjadi petani penggarap ?
4. Apa saja yang menjadi tanggung jawab petani penggarap ?
5. Bagaimana rincian biayanya ?
6. Apakah ada perbedaan saat musim kemarau atau musim penghujan ?
7. Bagaimana jika terjadi gagal panen ?
8. Bagaimana cara pembagiannya ?
9. Apakah dengan menjadi petani penggarap dapat meningkatkan pendapatan?
10. Selain menjadi petani penggarap, adakah pekerjaan yang lain ?

## Dokumentasi









## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Alfinatin Rizqi Mukaromah

Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 14 Mei 1997

Tempat tinggal : Jl. Raya Karangsembung Rt:03/Rw:01  
Kecamatan Songgom Kabupaten  
Brebes

Agama : Islam

No.HP : 083824623834

Email : alfinatinrizqi97@gmail.com

Pendidikan :

- a. SDN Karangsembung 02 (2003-2009)
- b. SMP N 02 Songgom (2009-2012)
- c. MAN Babakan Ciwaringin Cirebon (2012-2015)
- d. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.